

EKONOMI POLITIK INDONESIA 2026: ANTARA PERTUMBUHAN, STABILITAS, DAN KESEJAHTERAAN

Oleh

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycr.com/cv.pdf

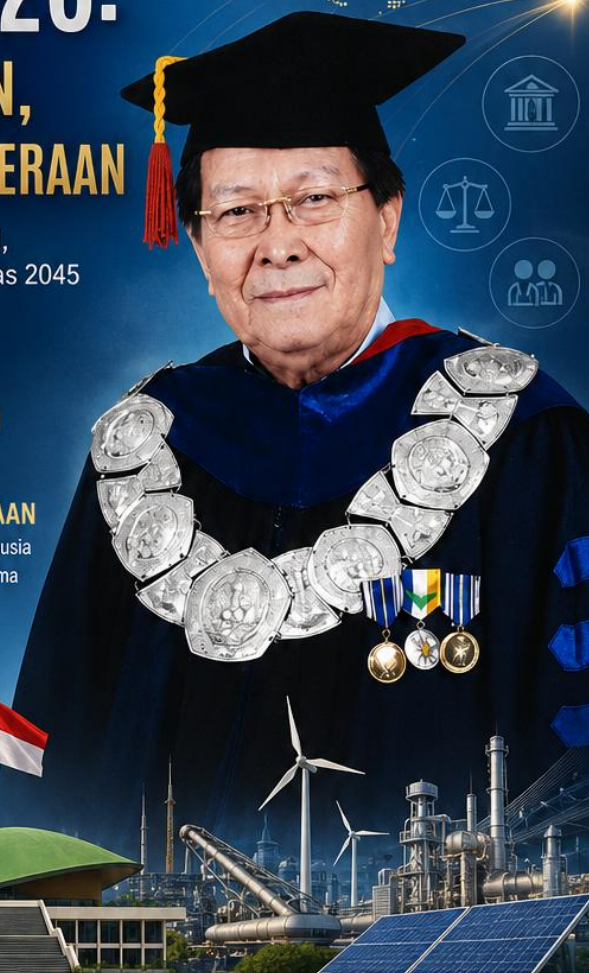
Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

Pertumbuhan ekonomi memperoleh makna pembangunan ketika stabilitas menjaga daya beli, institusi menjamin keadilan, dan hasil kemajuan dapat dirasakan secara luas.

EKONOMI POLITIK INDONESIA 2026:

ANTARA PERTUMBUHAN, STABILITAS, DAN KESEJAHTERAAN

Menakar Arah Kebijakan, Tantangan Struktural, dan Agenda Transformasi untuk Indonesia Emas 2045





PERTUMBUHAN

Mendorong produktivitas dan daya saing untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan



STABILITAS

Menjaga stabilitas makro, fiskal, dan politik sebagai fondasi kepercayaan dan investasi



KESEJAHTERAAN

Menempatkan manusia sebagai tujuan utama pembangunan dan keadilan sosial

“ Tata kelola yang baik adalah jembatan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui institusi yang kuat dan kepemimpinan yang bijaksana. ”



TATA KELOLA DAN INSTITUSI

Memperkuat birokrasi, rule of law, dan akuntabilitas publik



TRANSFORMASI EKONOMI

Hilirisasi, inovasi, dan ekonomi digital untuk nilai tambah tinggi



PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Ekonomi hijau, ketahanan lingkungan, dan transisi energi berkeadilan



SUMBER DAYA MANUSIA

Pendidikan, kesehatan, dan keterampilan untuk daya saing bangsa



KEADILAN SOSIAL DAN INKLUSI

Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan untuk masyarakat sejahtera



STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN

Demokrasi yang sehat, keamanan nasional, dan diplomasi aktif

Oleh:
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD



 www.rudycct.com/cv.pdf
 IBM-ASMI
(Institut Bisnis dan Multimedia)


IBM-ASMI
INSTITUT BISNIS DAN MULTIMEDIA

Abstrak

Artikel ini menganalisis ekonomi politik Indonesia pada 2026 melalui tiga tujuan yang saling terkait namun sering berada dalam ketegangan, yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia memasuki 2026 dengan kapasitas ekonomi yang tetap resilien di tengah ketidakpastian global, perubahan geopolitik, tekanan nilai tukar, penyesuaian suku bunga, serta tuntutan pembiayaan pembangunan yang besar. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026 dan 5,45 persen sepanjang semester I-2026. Pada sisi sosial, kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 berada pada 4,65 persen. Namun indikator agregat tersebut belum otomatis menjawab persoalan kualitas pekerjaan, produktivitas, ketimpangan wilayah, daya beli, informalitas, akses pelayanan publik, dan mobilitas sosial. Dengan menggunakan perspektif ekonomi politik dan ekonomi kelembagaan, artikel ini menelaah bagaimana distribusi kekuasaan, desain institusi, kebijakan fiskal-moneter, struktur pasar, hilirisasi, investasi, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, desentralisasi, serta tata kelola memengaruhi siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya dari pertumbuhan. Argumen utama artikel adalah bahwa stabilitas bukan tujuan akhir dan pertumbuhan bukan ukuran tunggal keberhasilan. Keberhasilan pembangunan memerlukan pertumbuhan yang produktif, stabilitas yang kredibel, institusi yang akuntabel, serta mekanisme distribusi yang mengubah kemajuan makroekonomi menjadi peningkatan kemampuan hidup masyarakat. Indonesia memerlukan strategi ekonomi politik yang mengintegrasikan produktivitas, pekerjaan berkualitas, disiplin fiskal, transformasi struktural, penguatan kelas menengah, perlindungan kelompok rentan, serta tata kelola yang mampu membatasi rent seeking dan memastikan kebijakan publik berorientasi pada kepentingan jangka panjang.

Kata Kunci: ekonomi politik; pertumbuhan ekonomi; stabilitas makroekonomi; kesejahteraan; APBN; produktivitas; pekerjaan berkualitas; ketimpangan; hilirisasi; institusi; Indonesia 2026.

Snapshot Ekonomi Politik Indonesia 2026

Indikator	Nilai	Makna Analitis
Pertumbuhan PDB Triwulan II-2026	5,29% y-on-y	Momentum pertumbuhan tetap kuat, tetapi kualitas dan distribusinya perlu diperiksa.
Pertumbuhan Semester I-2026	5,45% c-to-c	Menunjukkan resiliensi aktivitas ekonomi pada paruh pertama 2026.

Inflasi IHK Juli 2026	2,88% y-on-y	Masih dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, tetapi tekanan biaya dan nilai tukar tetap relevan.
BI-Rate Juli 2026	5,75%	Kebijakan menekankan stabilitas nilai tukar dan inflasi di tengah ketidakpastian global.
TPT Mei 2026	4,65%	Pengangguran menurun, namun kualitas pekerjaan dan informalitas tetap menjadi agenda.
Rata-rata upah buruh Mei 2026	Rp3,39 juta/bulan	Menggarisbawahi pentingnya produktivitas dan daya beli pekerja.
Kemiskinan Maret 2026	8,07%	Kemajuan sosial berlanjut, tetapi kesenjangan kota-desa tetap nyata.
APBN Semester I-2026	Defisit 0,76% PDB	Ruang fiskal harus dijaga sembari membiayai prioritas pembangunan.

1. Pendahuluan: Membaca Indonesia 2026 melalui Ekonomi Politik

Indonesia pada 2026 memperlihatkan paradoks khas negara berkembang besar: kemampuan menjaga pertumbuhan di atas lima persen berjalan bersamaan dengan tuntutan agar pertumbuhan itu semakin terasa dalam pekerjaan, pendapatan, pelayanan publik, dan mobilitas sosial. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan pertumbuhan agregat dan pengalaman rumah tangga, ketidakpastian global dan kebutuhan stabilitas, dan legitimasi kebijakan ekonomi; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah pertumbuhan agregat dan pengalaman rumah tangga. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif

masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, ketidakpastian global dan kebutuhan stabilitas, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah legitimasi kebijakan ekonomi. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, distribusi manfaat pembangunan memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, hubungan negara, pasar, dan masyarakat, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan.

Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan pertumbuhan agregat dan pengalaman rumah tangga, ketidakpastian global dan kebutuhan stabilitas, legitimasi kebijakan ekonomi, distribusi manfaat pembangunan, dan hubungan negara, pasar, dan masyarakat secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Kesimpulan antara dari pembahasan ini ialah bahwa ekonomi politik yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kemampuan pemerintah bertindak dan kemampuan masyarakat mengawasi tindakan tersebut. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

2. Apa Itu Ekonomi Politik?

Ekonomi politik mempelajari bagaimana keputusan ekonomi dibentuk oleh kekuasaan, institusi, kepentingan, koalisi, serta proses politik, bukan semata-mata oleh mekanisme harga. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan alokasi sumber daya, distribusi kekuasaan, dan institusi formal dan informal; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah alokasi sumber daya. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, distribusi kekuasaan, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada

tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah institusi formal dan informal. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, pilihan kebijakan memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, pemenang dan pihak yang menanggung biaya, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan alokasi sumber daya, distribusi kekuasaan, institusi formal dan informal, pilihan kebijakan, dan pemenang dan pihak yang menanggung biaya secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Perspektif ini membantu menghindari dua ekstrem: keyakinan bahwa pasar selalu menyelesaikan semua persoalan dan keyakinan bahwa intervensi negara selalu menghasilkan manfaat. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

3. Lanskap Makroekonomi Indonesia 2026

Pertumbuhan 5,29 persen pada triwulan II-2026 memberi sinyal resiliensi, tetapi angka tersebut perlu dibaca bersama inflasi, suku bunga, nilai tukar, perdagangan, investasi, dan kualitas permintaan domestik. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan struktur PDB, konsumsi rumah tangga, dan belanja pemerintah; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah struktur PDB. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, konsumsi rumah tangga, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah belanja pemerintah. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, investasi memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, perdagangan dan nilai tukar, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan struktur PDB, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan perdagangan dan nilai tukar secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Pada akhirnya, kualitas kebijakan diuji melalui daya tahannya terhadap pergantian pejabat, tekanan kelompok kepentingan, dan guncangan eksternal. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

4. Pertumbuhan: Angka yang Penting tetapi Tidak Cukup

PDB tetap merupakan indikator penting kapasitas ekonomi, namun kualitas pertumbuhan ditentukan oleh produktivitas, intensitas penciptaan pekerjaan, pemerataan wilayah, dan kemampuan memperluas peluang. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan produktivitas tenaga kerja, job-rich growth, dan sebaran sektoral; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi

ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah produktivitas tenaga kerja. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, *job-rich growth*, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah sebaran sektoral. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, mobilitas sosial memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, ketahanan kelas menengah, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi

kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan produktivitas tenaga kerja, job-rich growth, sebaran sektoral, mobilitas sosial, dan ketahanan kelas menengah secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa banyak kebijakan diumumkan, melainkan seberapa jauh kebijakan tersebut memperbaiki insentif, memperkuat institusi, dan menghasilkan manfaat yang dapat diverifikasi. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

5. Stabilitas sebagai Modal Pembangunan

Stabilitas harga, nilai tukar, sistem keuangan, dan fiskal adalah prasyarat agar rumah tangga dan dunia usaha dapat membuat keputusan jangka panjang dengan tingkat ketidakpastian yang terkendali. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah inflasi. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki

indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, nilai tukar rupiah, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah suku bunga. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, stabilitas sistem keuangan memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, ekspektasi pelaku ekonomi, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, stabilitas sistem keuangan, dan ekspektasi pelaku ekonomi secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Kesimpulan antara dari pembahasan ini ialah bahwa ekonomi politik yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kemampuan pemerintah bertindak dan kemampuan masyarakat mengawasi tindakan tersebut. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

6. Dilema Kebijakan Moneter 2026

Kenaikan BI-Rate hingga 5,75 persen pada pertengahan 2026 memperlihatkan dilema klasik antara kebutuhan mempertahankan stabilitas nilai tukar dan inflasi dengan kebutuhan menjaga pembiayaan pertumbuhan. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan transmisi suku bunga, aliran modal, dan kredit sektor riil; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah transmisi suku bunga. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, aliran modal, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah kredit sektor riil. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, inflasi impor memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, koordinasi fiskal-moneter, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan transmisi suku bunga, aliran modal, kredit sektor riil, inflasi impor, dan koordinasi fiskal-moneter secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Perspektif ini membantu menghindari dua ekstrem: keyakinan bahwa pasar selalu menyelesaikan semua persoalan dan keyakinan bahwa intervensi negara selalu menghasilkan manfaat. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

7. APBN sebagai Instrumen Ekonomi Politik

Anggaran negara tidak pernah netral secara distributif karena setiap keputusan pendapatan dan belanja menentukan kelompok, sektor, wilayah, dan generasi yang memperoleh manfaat atau menanggung biaya. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan pendapatan negara, belanja prioritas, dan defisit dan pembiayaan; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah pendapatan negara. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, belanja prioritas, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah defisit dan pembiayaan. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, kualitas belanja memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena

siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, keadilan antargenerasi, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan pendapatan negara, belanja prioritas, defisit dan pembiayaan, kualitas belanja, dan keadilan antargenerasi secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Pada akhirnya, kualitas kebijakan diuji melalui daya tahannya terhadap pergantian pejabat, tekanan kelompok kepentingan, dan guncangan eksternal. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

8. Ruang Fiskal dan Politik Prioritas

Ruang fiskal merupakan kemampuan negara membiayai prioritas tanpa merusak keberlanjutan anggaran, sehingga persoalannya bukan sekadar berapa besar belanja tetapi apa yang dikorbankan ketika satu program dipilih. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan mandatory spending, subsidi, dan perlindungan sosial; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah mandatory spending. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, subsidi, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah perlindungan sosial. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, infrastruktur memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, opportunity cost, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam

lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan mandatory spending, subsidi, perlindungan sosial, infrastruktur, dan opportunity cost secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa banyak kebijakan diumumkan, melainkan seberapa jauh kebijakan tersebut memperbaiki insentif, memperkuat institusi, dan menghasilkan manfaat yang dapat diverifikasi. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

9. Pajak, Kepatuhan, dan Kontrak Sosial

Pajak adalah fondasi kapasitas negara sekaligus cermin kontrak sosial: warga lebih bersedia membayar ketika pemerintah dianggap adil, kompeten, transparan, dan mampu mengubah penerimaan menjadi pelayanan. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan tax ratio, kepatuhan sukarela, dan keadilan pajak; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah tax ratio. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, kepatuhan sukarela, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang

bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah keadilan pajak. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, digitalisasi administrasi memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, legitimasi fiskal, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan tax ratio, kepatuhan sukarela, keadilan pajak, digitalisasi administrasi, dan legitimasi fiskal secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Kesimpulan antara dari pembahasan ini ialah bahwa ekonomi politik yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kemampuan pemerintah bertindak dan kemampuan masyarakat mengawasi tindakan tersebut. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

10. Belanja Sosial dan Kesejahteraan

Penurunan kemiskinan menjadi 8,07 persen pada Maret 2026 merupakan kemajuan, tetapi kebijakan kesejahteraan harus bergerak dari sekadar perlindungan minimum menuju penguatan kapabilitas produktif. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan kemiskinan, ketepatan sasaran, dan jaminan sosial; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah kemiskinan. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, ketepatan sasaran, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah jaminan sosial. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, layanan dasar memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, graduasi dari bantuan, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan, ketepatan sasaran, jaminan sosial, layanan dasar, dan graduasi dari bantuan secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Perspektif ini membantu menghindari dua ekstrem: keyakinan bahwa pasar selalu menyelesaikan semua persoalan dan keyakinan bahwa intervensi negara selalu menghasilkan manfaat. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

11. Kelas Menengah dan Kerentanan Baru

Kelas menengah mempunyai fungsi ekonomi dan politik yang strategis karena menopang konsumsi, penerimaan pajak, stabilitas sosial, serta permintaan terhadap layanan publik berkualitas. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan daya beli, biaya perumahan, dan pendidikan dan kesehatan; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan

berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah daya beli. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, biaya perumahan, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah pendidikan dan kesehatan. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, tabungan rumah tangga memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, kerentanan guncangan, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan

efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan daya beli, biaya perumahan, pendidikan dan kesehatan, tabungan rumah tangga, dan kerentanan guncangan secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Pada akhirnya, kualitas kebijakan diuji melalui daya tahannya terhadap pergantian pejabat, tekanan kelompok kepentingan, dan guncangan eksternal. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

12. Ketenagakerjaan sebagai Uji Kualitas Pertumbuhan

TPT Mei 2026 sebesar 4,65 persen menunjukkan perbaikan, tetapi ukuran keberhasilan harus diperluas menuju pekerjaan berkualitas, upah layak, perlindungan sosial, dan prospek peningkatan kompetensi. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan pengangguran, informalitas, dan upah; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah pengangguran. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, informalitas, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah upah. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, produktivitas memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, decent work, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan pengangguran, informalitas, upah, produktivitas, dan decent work secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri,

pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa banyak kebijakan diumumkan, melainkan seberapa jauh kebijakan tersebut memperbaiki insentif, memperkuat institusi, dan menghasilkan manfaat yang dapat diverifikasi. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

13. Produktivitas: Jembatan antara Upah dan Daya Saing

Pertumbuhan upah yang berkelanjutan membutuhkan produktivitas yang meningkat; tanpa itu perusahaan menghadapi tekanan biaya dan pekerja sulit memperoleh peningkatan pendapatan riil. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan teknologi, modal manusia, dan manajemen; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah teknologi. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, modal manusia, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah manajemen. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta

sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, infrastruktur memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, skala usaha, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan teknologi, modal manusia, manajemen, infrastruktur, dan skala usaha secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Kesimpulan antara dari pembahasan ini ialah bahwa ekonomi politik yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kemampuan pemerintah bertindak dan kemampuan masyarakat mengawasi tindakan tersebut. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

14. Informalitas dan Dualisme Ekonomi

Besarnya pekerjaan informal menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat berpartisipasi dalam ekonomi tanpa kepastian pendapatan, perlindungan memadai, atau akses pembiayaan produktif. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan usaha mikro, pekerja mandiri, dan jaminan sosial; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah usaha mikro. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, pekerja mandiri, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah jaminan sosial. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, formalisasi memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun

konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, biaya regulasi, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan usaha mikro, pekerja mandiri, jaminan sosial, formalisasi, dan biaya regulasi secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Perspektif ini membantu menghindari dua ekstrem: keyakinan bahwa pasar selalu menyelesaikan semua persoalan dan keyakinan bahwa intervensi negara selalu menghasilkan manfaat. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

15. UMKM sebagai Ekonomi Rakyat

UMKM memiliki nilai ekonomi dan sosial besar, tetapi kebijakan yang hanya menambah jumlah usaha tanpa menaikkan produktivitas akan mempertahankan fragmentasi dan pendapatan rendah. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan akses pembiayaan, digitalisasi, dan rantai pasok; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah akses pembiayaan. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat

yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, digitalisasi, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah rantai pasok. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, manajemen memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, naik kelas, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat

fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan akses pembiayaan, digitalisasi, rantai pasok, manajemen, dan naik kelas secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Pada akhirnya, kualitas kebijakan diuji melalui daya tahannya terhadap pergantian pejabat, tekanan kelompok kepentingan, dan guncangan eksternal. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

16. Industrialisasi dan Hilirisasi

Hilirisasi memperoleh legitimasi ketika nilai tambah domestik meningkat, keterkaitan industri tumbuh, teknologi ditransfer, dan pekerjaan berkualitas tercipta, bukan hanya ketika ekspor produk olahan naik. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan mineral kritis, nilai tambah, dan transfer teknologi; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah mineral kritis. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, nilai tambah, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah

tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah transfer teknologi. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, local content memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, environmental governance, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan mineral kritis, nilai tambah, transfer teknologi, local content, dan environmental governance secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa banyak kebijakan diumumkan, melainkan seberapa jauh kebijakan tersebut memperbaiki insentif, memperkuat institusi, dan menghasilkan

manfaat yang dapat diverifikasi. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

17. Investasi dan Kualitas Iklim Usaha

Investasi merupakan mesin pembentukan kapasitas produksi, tetapi dampak kesejahtraannya bergantung pada sektor tujuan, kualitas pekerjaan, efek keterkaitan, kompetisi, dan tata kelola. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan FDI, investasi domestik, dan kepastian hukum; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah FDI. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, investasi domestik, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah kepastian hukum. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, perizinan memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah

menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, spillover teknologi, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan FDI, investasi domestik, kepastian hukum, perizinan, dan spillover teknologi secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Kesimpulan antara dari pembahasan ini ialah bahwa ekonomi politik yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kemampuan pemerintah bertindak dan kemampuan masyarakat mengawasi tindakan tersebut. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

18. BUMN, Negara, dan Pasar

BUMN berada pada persimpangan antara fungsi komersial dan mandat publik, sehingga tata kelolanya harus mampu mencegah konflik kepentingan sambil memanfaatkan skala untuk tujuan strategis. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan public service obligation, corporate governance, dan efisiensi; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa

makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah public service obligation. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, corporate governance, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah efisiensi. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, dividen memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, strategic industries, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan

efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan public service obligation, corporate governance, efisiensi, dividen, dan strategic industries secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Perspektif ini membantu menghindari dua ekstrem: keyakinan bahwa pasar selalu menyelesaikan semua persoalan dan keyakinan bahwa intervensi negara selalu menghasilkan manfaat. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

19. Persaingan Usaha dan Konsentrasi Ekonomi

Pasar yang kompetitif mendorong inovasi dan efisiensi, sedangkan konsentrasi berlebihan dapat meningkatkan harga, menghambat pemain baru, dan memperkuat pengaruh politik pemilik modal besar. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan market power, barriers to entry, dan antitrust; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah market power. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, *barriers to entry*, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah antitrust. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, *platform economy* memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, *regulatory capture*, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan *market power*, *barriers to entry*, antitrust, *platform economy*, dan *regulatory capture* secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter,

ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Pada akhirnya, kualitas kebijakan diuji melalui daya tahannya terhadap pergantian pejabat, tekanan kelompok kepentingan, dan guncangan eksternal. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

20. Korupsi, Rent Seeking, dan Biaya Tersembunyi

Korupsi dan rent seeking mengubah kebijakan dari sarana menciptakan nilai publik menjadi arena perebutan rente, sehingga biaya pembangunan jauh melampaui nilai uang yang secara langsung hilang. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan pengadaan, perizinan, dan patronase; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah pengadaan. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, perizinan, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah patronase. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas

tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, regulatory capture memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, trust, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan pengadaan, perizinan, patronase, regulatory capture, dan trust secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa banyak kebijakan diumumkan, melainkan seberapa jauh kebijakan tersebut memperbaiki insentif, memperkuat institusi, dan menghasilkan manfaat yang dapat diverifikasi. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

21. Demokrasi, Oligarki, dan Kebijakan Ekonomi

Demokrasi membuka ruang representasi, tetapi kualitas ekonomi politik ditentukan oleh seberapa jauh proses kebijakan mampu mengubah preferensi warga menjadi keputusan tanpa didominasi kepentingan sempit. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan pembiayaan politik, representasi, dan lobi; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah pembiayaan politik. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, representasi, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah lobi. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, akuntabilitas memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun

konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, *checks and balances*, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan pembiayaan politik, representasi, lobi, akuntabilitas, dan *checks and balances* secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Kesimpulan antara dari pembahasan ini ialah bahwa ekonomi politik yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kemampuan pemerintah bertindak dan kemampuan masyarakat mengawasi tindakan tersebut. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

22. Birokrasi dan Kapasitas Negara

Kebijakan yang baik memerlukan birokrasi yang mampu menerjemahkan keputusan politik menjadi implementasi konsisten, berbasis data, dan responsif terhadap variasi kondisi daerah. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan sistem merit, koordinasi, dan *delivery capacity*; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah sistem merit. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, koordinasi, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah delivery capacity. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, digital government memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, evaluasi kebijakan, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam

lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan sistem merit, koordinasi, delivery capacity, digital government, dan evaluasi kebijakan secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Perspektif ini membantu menghindari dua ekstrem: keyakinan bahwa pasar selalu menyelesaikan semua persoalan dan keyakinan bahwa intervensi negara selalu menghasilkan manfaat. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

23. Desentralisasi dan Ketimpangan Wilayah

Desentralisasi dapat mendekatkan keputusan kepada warga, tetapi hasilnya bergantung pada kapasitas fiskal, kualitas institusi lokal, serta mekanisme koordinasi pusat-daerah. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan transfer fiskal, PAD, dan kapasitas daerah; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah transfer fiskal. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, PAD, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih

mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah kapasitas daerah. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, Jawa-luar Jawa memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, pelayanan dasar, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan transfer fiskal, PAD, kapasitas daerah, Jawa-luar Jawa, dan pelayanan dasar secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Pada akhirnya, kualitas kebijakan diuji melalui daya tahannya terhadap pergantian pejabat, tekanan kelompok kepentingan, dan guncangan eksternal. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

24. Pangan dan Ekonomi Politik Harga

Pangan menyentuh sekaligus produsen dan konsumen, sehingga kebijakan harga yang tampak sederhana sering menciptakan trade-off antara pendapatan petani, inflasi, dan daya beli rumah tangga. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan beras, stok dan distribusi, dan petani kecil; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah beras. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, stok dan distribusi, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah petani kecil. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, harga konsumen memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, ketahanan pangan, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan beras, stok dan distribusi, petani kecil, harga konsumen, dan ketahanan pangan secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa banyak kebijakan diumumkan, melainkan seberapa jauh kebijakan tersebut memperbaiki insentif, memperkuat institusi, dan menghasilkan manfaat yang dapat diverifikasi. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

25. Energi, Subsidi, dan Transisi

Kebijakan energi harus menyeimbangkan keterjangkauan, keamanan pasokan, ruang fiskal, daya saing industri, dan transisi menuju sistem rendah karbon. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan subsidi energi, ketahanan energi, dan transisi hijau; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang

menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah subsidi energi. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, ketahanan energi, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah transisi hijau. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, pricing memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, keadilan energi, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan

efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan subsidi energi, ketahanan energi, transisi hijau, pricing, dan keadilan energi secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Kesimpulan antara dari pembahasan ini ialah bahwa ekonomi politik yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kemampuan pemerintah bertindak dan kemampuan masyarakat mengawasi tindakan tersebut. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

26. Ekonomi Digital dan AI

Digitalisasi dan AI dapat menaikkan produktivitas, tetapi juga menggeser struktur pekerjaan, memperkuat konsentrasi data, serta menimbulkan kebutuhan tata kelola baru. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan AI adoption, platform economy, dan data governance; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah AI adoption. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, platform economy, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah data governance. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, skills memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, digital divide, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan AI adoption, platform economy, data governance, skills, dan digital divide secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan,

industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Perspektif ini membantu menghindari dua ekstrem: keyakinan bahwa pasar selalu menyelesaikan semua persoalan dan keyakinan bahwa intervensi negara selalu menghasilkan manfaat. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

27. Pendidikan, Kesehatan, dan Modal Manusia

Belanja pendidikan dan kesehatan menjadi investasi ekonomi ketika benar-benar meningkatkan kemampuan belajar, kesehatan produktif, dan kualitas tenaga kerja, bukan sekadar memperbesar input administratif. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan learning outcomes, stunting, dan preventive health; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah learning outcomes. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, stunting, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah preventive health. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta

sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, vokasi memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, human capital, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan learning outcomes, stunting, preventive health, vokasi, dan human capital secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Pada akhirnya, kualitas kebijakan diuji melalui daya tahannya terhadap pergantian pejabat, tekanan kelompok kepentingan, dan guncangan eksternal. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

28. Lingkungan, Iklim, dan Kualitas Pertumbuhan

Pertumbuhan yang merusak basis ekologis memindahkan biaya ke masa depan, sehingga ekonomi politik pembangunan harus memasukkan nilai lingkungan, risiko iklim, dan distribusi beban transisi. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan deforestasi, polusi, dan resiliensi iklim; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah deforestasi. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, polusi, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah resiliensi iklim. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, green finance memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun

konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, just transition, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan deforestasi, polusi, resiliensi iklim, green finance, dan just transition secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa banyak kebijakan diumumkan, melainkan seberapa jauh kebijakan tersebut memperbaiki insentif, memperkuat institusi, dan menghasilkan manfaat yang dapat diverifikasi. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

29. Globalisasi yang Terfragmentasi

Ketegangan geopolitik, proteksionisme, dan rivalitas teknologi mengubah globalisasi dari sistem yang berorientasi efisiensi menjadi arena keamanan ekonomi dan diversifikasi rantai pasok. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan Amerika Serikat-Tiongkok, ASEAN, dan BRICS; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah Amerika Serikat-Tiongkok. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, ASEAN, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah BRICS. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, supply chain memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, *strategic autonomy*, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan Amerika Serikat-Tiongkok, ASEAN, BRICS, supply chain, dan strategic autonomy secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Kesimpulan antara dari pembahasan ini ialah bahwa ekonomi politik yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kemampuan pemerintah bertindak dan kemampuan masyarakat mengawasi tindakan tersebut. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

30. Kepercayaan Publik sebagai Aset Ekonomi

Kepercayaan mengurangi biaya transaksi, meningkatkan kepatuhan, dan memperkuat kemampuan pemerintah menjalankan kebijakan sulit; sebaliknya ketidakpercayaan membuat setiap reformasi lebih mahal secara politik. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan transparansi, konsistensi kebijakan, dan integritas; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah transparansi. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, konsistensi kebijakan, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi

keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah integritas. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, partisipasi memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, komunikasi publik, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan transparansi, konsistensi kebijakan, integritas, partisipasi, dan komunikasi publik secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu

ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Perspektif ini membantu menghindari dua ekstrem: keyakinan bahwa pasar selalu menyelesaikan semua persoalan dan keyakinan bahwa intervensi negara selalu menghasilkan manfaat. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

31. Mengukur Kesejahteraan Melampaui PDB

Kesejahteraan adalah konsep multidimensional yang mencakup pendapatan, kesehatan, pendidikan, keamanan, lingkungan, kualitas pekerjaan, kebebasan, dan kesempatan antargenerasi. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan PDB per kapita, kemiskinan, dan ketimpangan; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah PDB per kapita. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, kemiskinan, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah ketimpangan. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi

slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, human development memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, subjective well-being, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan PDB per kapita, kemiskinan, ketimpangan, human development, dan subjective well-being secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Pada akhirnya, kualitas kebijakan diuji melalui daya tahannya terhadap pergantian pejabat, tekanan kelompok kepentingan, dan guncangan eksternal. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

32. Skenario Ekonomi Politik Indonesia 2026-2030

Perjalanan menuju 2030 dapat mengambil lintasan pertumbuhan berkualitas, pertumbuhan rapuh, stabilitas tanpa transformasi, atau transformasi inklusif, tergantung kualitas pilihan kebijakan dan institusi. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan

sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan skenario optimistis, skenario moderat, dan skenario tekanan global; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah skenario optimistis. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, skenario moderat, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah skenario tekanan global. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, reformasi struktural memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, resiliensi, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara

sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan skenario optimistis, skenario moderat, skenario tekanan global, reformasi struktural, dan resiliensi secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa banyak kebijakan diumumkan, melainkan seberapa jauh kebijakan tersebut memperbaiki insentif, memperkuat institusi, dan menghasilkan manfaat yang dapat diverifikasi. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

33. Agenda Kebijakan: Pertumbuhan yang Produktif

Strategi pertumbuhan harus memprioritaskan peningkatan produktivitas total, investasi yang memiliki spillover, industrialisasi berbasis teknologi, dan konektivitas yang menurunkan biaya ekonomi. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan inovasi, infrastruktur, dan R&D; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah inovasi. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki

indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, infrastruktur, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah R&D. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, FDI spillovers memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, cluster industri, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan inovasi, infrastruktur, R&D, FDI spillovers, dan cluster industri secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Kesimpulan antara dari pembahasan ini ialah bahwa ekonomi politik yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kemampuan pemerintah bertindak dan kemampuan masyarakat mengawasi tindakan tersebut. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

34. Agenda Kebijakan: Stabilitas yang Melindungi Transformasi

Stabilitas harus dirancang sebagai fondasi bagi investasi jangka panjang dan perlindungan daya beli, bukan sebagai alasan mempertahankan struktur ekonomi yang tidak produktif. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan credibility, macroprudential policy, dan cadangan devisa; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah credibility. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, macroprudential policy, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah cadangan devisa. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, fiscal buffers memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, policy coordination, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan credibility, macroprudential policy, cadangan devisa, fiscal buffers, dan policy coordination secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Perspektif ini membantu menghindari dua ekstrem: keyakinan bahwa pasar selalu menyelesaikan semua persoalan dan keyakinan bahwa intervensi negara selalu menghasilkan manfaat. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

35. Agenda Kebijakan: Kesejahteraan sebagai Tujuan Akhir

Kesejahteraan harus ditempatkan sebagai tujuan akhir ekonomi politik melalui pekerjaan berkualitas, layanan dasar bermutu, jaminan sosial adaptif, dan kesempatan mobilitas sosial. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan social mobility, universal basic services, dan targeted transfers; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah social mobility. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, universal basic services, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah targeted transfers. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, quality jobs memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun

konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, regional equity, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan social mobility, universal basic services, targeted transfers, quality jobs, dan regional equity secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Pada akhirnya, kualitas kebijakan diuji melalui daya tahannya terhadap pergantian pejabat, tekanan kelompok kepentingan, dan guncangan eksternal. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

36. Institusi sebagai Pengikat Pertumbuhan, Stabilitas, dan Kesejahteraan

Institusi menentukan apakah pertumbuhan dapat dipertahankan, stabilitas dapat dipercaya, dan kesejahteraan dapat dibagi secara adil karena institusi membentuk insentif serta batas terhadap kekuasaan. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan rule of law, meritocracy, dan accountability; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah rule of law. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, meritocracy, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah accountability. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, policy continuity memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, anti-rent-seeking, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam

lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan rule of law, meritocracy, accountability, policy continuity, dan anti-rent-seeking secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa banyak kebijakan diumumkan, melainkan seberapa jauh kebijakan tersebut memperbaiki insentif, memperkuat institusi, dan menghasilkan manfaat yang dapat diverifikasi. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

37. Indonesia Emas 2045 dan Ujian Dua Dekade

Visi Indonesia Emas 2045 menuntut lebih dari proyeksi pendapatan; ia memerlukan transformasi produktivitas, kualitas manusia, institusi, dan kemampuan membangun konsensus lintas generasi. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan high income transition, demografi, dan teknologi; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah high income transition. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, demografi, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan

transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah teknologi. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, institusi memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, keberlanjutan, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan high income transition, demografi, teknologi, institusi, dan keberlanjutan secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Kesimpulan antara dari pembahasan ini ialah bahwa ekonomi politik yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kemampuan pemerintah bertindak dan kemampuan masyarakat mengawasi tindakan tersebut. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

38. Penutup: Dari Statistik Menuju Kehidupan yang Lebih Baik

Ekonomi politik yang berhasil adalah ekonomi politik yang mampu mengubah angka pertumbuhan menjadi pekerjaan, stabilitas menjadi rasa aman, dan kapasitas fiskal menjadi pelayanan yang memperluas kemampuan manusia. Dalam kerangka ekonomi politik, persoalan ini tidak dapat dibaca hanya sebagai hubungan sebab-akibat teknis. Ia selalu berhubungan dengan integrasi kebijakan, keadilan, dan resiliensi; ketiganya menentukan siapa yang mempunyai akses terhadap sumber daya, siapa yang mampu memengaruhi keputusan, dan kelompok mana yang menanggung konsekuensi ketika kebijakan berubah. Karena itu, pembacaan terhadap Indonesia 2026 membutuhkan dua lensa sekaligus: lensa makro yang melihat stabilitas dan agregat nasional, serta lensa distributif yang memeriksa bagaimana hasil pembangunan diterjemahkan ke tingkat rumah tangga, perusahaan, daerah, dan generasi.

Dimensi pertama adalah integrasi kebijakan. Kebijakan publik sering dinilai berhasil ketika indikator rata-rata membaik, padahal rata-rata dapat menyembunyikan variasi yang lebar. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, perubahan harga, pendapatan, akses kredit, atau kesempatan kerja mempunyai dampak berbeda pada pekerja formal, pekerja informal, petani, pelaku UMKM, perusahaan besar, dan kelompok berpendapatan rendah. Analisis ekonomi politik menuntut pertanyaan lanjutan: apakah perubahan tersebut memperkuat kapasitas produktif masyarakat atau hanya memperbaiki indikator jangka pendek; apakah ia memperluas kesempatan atau justru memperbesar ketergantungan; serta apakah manfaatnya dapat dipertahankan setelah dukungan kebijakan berakhir.

Dimensi kedua, keadilan, menyoroti pentingnya insentif. Aktor ekonomi dan politik merespons aturan, harga, peluang rente, risiko, dan ekspektasi. Jika struktur insentif memberi keuntungan lebih besar pada pencarian akses politik daripada inovasi, investasi produktif, atau peningkatan keterampilan, maka sumber daya akan bergerak ke aktivitas yang secara sosial kurang bernilai. Sebaliknya, ketika aturan transparan, kompetisi wajar, hak kepemilikan terlindungi, dan kebijakan konsisten, pelaku usaha lebih mungkin menanamkan modal untuk jangka panjang. Pada tingkat rumah tangga, kepastian juga penting karena keputusan pendidikan, migrasi, tabungan, dan konsumsi sangat dipengaruhi oleh harapan terhadap masa depan.

Dimensi ketiga adalah resiliensi. Di sinilah kualitas institusi menjadi menentukan. Institusi yang kuat bukan semata banyaknya regulasi, melainkan kemampuan aturan untuk dipatuhi, diterapkan secara konsisten, dievaluasi, dan dikoreksi ketika hasilnya tidak sesuai tujuan. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu menghubungkan perencanaan dengan penganggaran dan implementasi, serta sistem pengawasan yang mencegah kebijakan dibajak oleh kepentingan sempit. Tanpa kapasitas tersebut, tujuan seperti pertumbuhan inklusif atau peningkatan produktivitas mudah berubah menjadi

slogan karena pelaksanaan terfragmentasi antara kementerian, pemerintah daerah, badan usaha, dan aktor sosial.

Selanjutnya, produktivitas memperlihatkan bahwa ekonomi politik selalu memiliki horizon waktu. Kebijakan yang populer saat ini belum tentu produktif bagi lima atau sepuluh tahun ke depan. Pemerintah menghadapi godaan untuk memilih manfaat yang cepat terlihat, sedangkan investasi pada institusi, pendidikan, riset, pencegahan penyakit, dan kualitas lingkungan sering membutuhkan waktu panjang untuk memberikan hasil. Dilema ini menjadi lebih tajam dalam sistem politik elektoral karena siklus politik lebih pendek daripada siklus pembangunan. Karena itu, kemampuan membangun konsensus antarpemerintahan dan menjaga kontinuitas kebijakan yang terbukti efektif merupakan bagian penting dari kapasitas negara.

Dimensi kelima, kepercayaan, membawa analisis kembali kepada tujuan normatif pembangunan. Pertumbuhan tidak netral ketika kualitas akses, kesempatan, dan perlindungan berbeda secara sistematis. Kebijakan yang tampak efisien secara agregat dapat menimbulkan biaya besar bagi kelompok tertentu. Ekonomi politik yang matang tidak berarti menolak efisiensi, tetapi menggabungkan efisiensi dengan keadilan, transparansi, dan mekanisme kompensasi yang masuk akal. Dengan cara itu, reformasi memperoleh legitimasi sosial dan tidak mudah dibalik ketika muncul tekanan politik.

Dalam konteks Indonesia 2026, isu pada bagian ini juga perlu dibaca bersama ketidakpastian global, perubahan teknologi, dan pergeseran struktur demografi. Ekonomi nasional beroperasi dalam lingkungan ketika modal dapat berpindah cepat, rantai pasok dapat berubah akibat konflik geopolitik, dan teknologi digital dapat menggeser model bisnis dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat fleksibilitas kebijakan penting, namun fleksibilitas harus dibedakan dari ketidakpastian aturan. Fleksibilitas berarti kemampuan menyesuaikan instrumen berdasarkan bukti tanpa mengubah prinsip dasar secara sewenang-wenang.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya pendekatan portofolio. Tidak ada satu instrumen yang dapat menyelesaikan persoalan integrasi kebijakan, keadilan, resiliensi, produktivitas, dan kepercayaan secara bersamaan. Kebijakan fiskal perlu terhubung dengan kebijakan moneter, ketenagakerjaan, industri, pendidikan, perlindungan sosial, dan reformasi tata kelola. Koordinasi ini harus didukung oleh indikator hasil, bukan hanya indikator penyerapan anggaran. Setiap program perlu ditanya: nilai publik apa yang diciptakan, siapa yang memperoleh manfaat, apa biaya peluangnya, dan apakah dampaknya meningkatkan kapasitas produktif masyarakat.

Perspektif ini membantu menghindari dua ekstrem: keyakinan bahwa pasar selalu menyelesaikan semua persoalan dan keyakinan bahwa intervensi negara selalu menghasilkan manfaat. Bagi Indonesia, kemampuan membangun keseimbangan tersebut akan menentukan apakah momentum 2026 menjadi jembatan menuju transformasi jangka panjang atau hanya fase pertumbuhan yang tidak cukup dalam.

Catatan Empiris Indonesia 2026

Data resmi yang tersedia sampai Agustus 2026 menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat. BPS mencatat PDB triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan dan pertumbuhan semester I mencapai 5,45 persen. Struktur ekonomi masih sangat terkonsentrasi di Jawa,

yang menyumbang 56,47 persen perekonomian pada triwulan II-2026. Konsentrasi ini menegaskan bahwa agenda pertumbuhan nasional tidak dapat dipisahkan dari agenda pemerataan spasial dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Pada sisi stabilitas, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate 5,75 persen pada Juli 2026 setelah sebelumnya melakukan pengetatan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi tetap dalam sasaran $2,5 \pm 1$ persen. Inflasi IHK Juli 2026 tercatat 2,88 persen secara tahunan. Kombinasi ini menggambarkan kebijakan pro-stability yang tetap berupaya menjaga ruang bagi pertumbuhan melalui instrumen makroprudensial dan pendalaman pasar keuangan.

Pada sisi fiskal, APBN semester I-2026 mencatat pendapatan negara Rp1.459,4 triliun dan belanja negara Rp1.656,0 triliun, dengan defisit Rp196,5 triliun atau 0,76 persen PDB serta surplus keseimbangan primer Rp85,1 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal masih memiliki fungsi stabilisasi sekaligus pembangunan, tetapi prioritas belanja dan kualitas hasil tetap menjadi persoalan utama ketika kebutuhan pembiayaan semakin beragam.

Pada sisi pasar kerja, Sakernas Mei 2026 mencatat angkatan kerja 155,41 juta orang dan penduduk bekerja 148,19 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada 4,65 persen dan rata-rata upah buruh Rp3,39 juta per bulan. Angka pengangguran yang relatif rendah perlu dibaca bersama struktur pekerjaan, karena pertanian masih menyerap sekitar 28,75 persen pekerja. Pertanyaan kebijakan bukan hanya bagaimana menambah pekerjaan, tetapi bagaimana menaikkan produktivitas dan kualitas penghasilan.

Pada sisi kesejahteraan, persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Namun kemiskinan perdesaan masih 10,67 persen, jauh di atas perkotaan 6,34 persen. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan, transformasi ekonomi, dan kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya menghasilkan konvergensi kesejahteraan antarwilayah. Oleh sebab itu, strategi kesejahteraan perlu menggabungkan perlindungan sosial dengan peningkatan produktivitas lokal, konektivitas, layanan dasar, dan kesempatan kerja.

Dua Belas Agenda Strategis Ekonomi Politik Indonesia

- 1. Menempatkan produktivitas sebagai pusat strategi pertumbuhan, bukan hanya ekspansi input modal dan tenaga kerja.**
- 2. Menjaga kredibilitas stabilitas harga dan nilai tukar sambil memastikan transmisi pembiayaan ke sektor produktif.**
- 3. Memperkuat kualitas APBN melalui evaluasi berbasis hasil, biaya peluang, dan dampak distribusi.**
- 4. Memperluas basis pajak secara adil sambil meningkatkan kepastian hukum dan kualitas pelayanan administrasi.**
- 5. Mendorong pekerjaan berkualitas, formalisasi bertahap, perlindungan sosial portabel, dan peningkatan upah berbasis produktivitas.**
- 6. Mengubah hilirisasi menjadi strategi industrialisasi yang menghasilkan teknologi, keterampilan, pemasok domestik, dan nilai tambah lokal.**

7. Mengembangkan UMKM melalui peningkatan produktivitas, manajemen, akses pembiayaan, standarisasi, dan integrasi rantai pasok.
8. Memperkuat persaingan usaha dan mencegah regulatory capture serta rent seeking dalam perizinan, pengadaan, dan kebijakan industri.
9. Membangun kapasitas birokrasi berbasis merit, data, koordinasi lintas sektor, dan evaluasi yang independen.
10. Mengurangi ketimpangan wilayah melalui reformasi transfer fiskal, konektivitas, layanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal.
11. Mengintegrasikan agenda digital, AI, energi, dan transisi hijau dengan strategi penciptaan pekerjaan dan perlindungan kelompok terdampak.
12. Membangun kontrak sosial baru yang menghubungkan pajak, pelayanan publik, transparansi, partisipasi, dan kepercayaan.

Glossarium

APBN — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, instrumen utama kebijakan fiskal pemerintah pusat.

BI-Rate — Suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang menjadi sinyal stance kebijakan moneter.

Ekonomi politik — Kajian mengenai hubungan antara kekuasaan, institusi, kepentingan, dan alokasi sumber daya ekonomi.

Fiscal space — Ruang fiskal yang memungkinkan pemerintah menambah atau mengubah belanja tanpa mengganggu keberlanjutan keuangan publik.

Good governance — Tata kelola yang menekankan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, partisipasi, dan rule of law.

Hilirisasi — Proses meningkatkan nilai tambah sumber daya melalui pengolahan lebih lanjut dan penguatan keterkaitan industri domestik.

Informalitas — Kondisi pekerjaan atau usaha yang belum sepenuhnya tercakup oleh aturan formal, pajak, atau perlindungan sosial.

Institusi — Aturan formal dan informal yang membentuk insentif dan perilaku aktor ekonomi-politik.

Keseimbangan primer — Selisih pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Kesejahteraan — Keadaan multidimensional yang mencakup pendapatan, kesehatan, pendidikan, keamanan, kualitas lingkungan, dan kebebasan menjalani kehidupan yang bernilai.

Ketahanan ekonomi — Kemampuan ekonomi menyerap guncangan, menyesuaikan diri, dan memulihkan kinerja tanpa kehilangan kapasitas produktif utama.

Middle-income trap — Situasi ketika negara mengalami kesulitan beralih dari pendapatan menengah menuju pendapatan tinggi karena produktivitas dan institusi tidak berkembang memadai.

Monetary policy transmission — Mekanisme bagaimana perubahan kebijakan moneter memengaruhi suku bunga, kredit, nilai tukar, permintaan, dan inflasi.

Opportunity cost — Nilai manfaat terbaik yang dikorbankan ketika memilih satu alternatif kebijakan dibanding alternatif lainnya.

Productivity — Kemampuan menghasilkan output dari sejumlah input; peningkatan produktivitas memungkinkan kenaikan pendapatan riil yang lebih berkelanjutan.

Regulatory capture — Keadaan ketika regulator atau proses regulasi lebih banyak melayani kepentingan kelompok yang diatur daripada kepentingan publik.

Rent seeking — Upaya memperoleh keuntungan ekonomi melalui pengaruh atas aturan, lisensi, monopoli, atau akses politik tanpa menciptakan nilai produktif sebanding.

Rule of law — Prinsip bahwa kekuasaan pemerintah dan warga tunduk pada hukum yang berlaku konsisten dan dapat diprediksi.

Social mobility — Kemampuan individu atau rumah tangga memperbaiki posisi sosial-ekonomi antargenerasi atau sepanjang siklus hidup.

State capacity — Kemampuan negara merumuskan, membiayai, mengimplementasikan, dan menegakkan kebijakan secara efektif.

Transformasi struktural — Perpindahan sumber daya menuju aktivitas dengan produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401.

<https://doi.org/10.1257/aer.91.5.1369>

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown.

Alesina, A., & Rodrik, D. (1994). Distributive politics and economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 109(2), 465–490. <https://doi.org/10.2307/2118470>

Badan Pusat Statistik. (2026a). *Ekonomi Indonesia triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen (y-on-y)*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026b). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,65 persen; rata-rata upah buruh sebesar 3,39 juta rupiah*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026c). *Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen*. BPS.

- Bank Indonesia. (2026a). BI-Rate tetap 5,75%: Memperkuat stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2026b). Indikator moneter. Bank Indonesia.
- Besley, T., & Persson, T. (2009). The origins of state capacity: Property rights, taxation, and politics. *American Economic Review*, 99(4), 1218–1244. <https://doi.org/10.1257/aer.99.4.1218>
- Hall, R. E., & Jones, C. I. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others? *Quarterly Journal of Economics*, 114(1), 83–116. <https://doi.org/10.1162/003355399555954>
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. World Bank Policy Research Working Paper 5430. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-5430>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). APBN Kita Juli 2026. Kementerian Keuangan.
- Krueger, A. O. (1974). The political economy of the rent-seeking society. *American Economic Review*, 64(3), 291–303.
- North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
- Olson, M. (1982). The rise and decline of nations. Yale University Press.
- Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Persson, T., & Tabellini, G. (2000). Political economics: Explaining economic policy. MIT Press.
- Rodrik, D. (2008). Second-best institutions. *American Economic Review*, 98(2), 100–104. <https://doi.org/10.1257/aer.98.2.100>
- Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development. *Journal of Economic Growth*, 9, 131–165. <https://doi.org/10.1023/B:JOEG.0000031425.72248.85>
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Alfred A. Knopf.
- Stiglitz, J. E. (2002). Information and the change in the paradigm in economics. *American Economic Review*, 92(3), 460–501. <https://doi.org/10.1257/00028280260136363>
- Tullock, G. (1967). The welfare costs of tariffs, monopolies, and theft. *Western Economic Journal*, 5(3), 224–232. <https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1967.tb01923.x>
- Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics: Taking stock, looking ahead. *Journal of Economic Literature*, 38(3), 595–613. <https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595>
- World Bank. (2017). World development report 2017: Governance and the law. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0950-7>

World Bank. (2020). *Aspiring Indonesia: Expanding the middle class*. World Bank.

<https://doi.org/10.1596/33237>

Lampiran Analitis: Dua Belas Kasus Hipotetis Ekonomi Politik

Kasus 1. Subsidi energi dan reformasi harga

Pemerintah mempertimbangkan penyesuaian subsidi ketika harga energi global naik. Kasus hipotetis ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi hampir selalu menghasilkan distribusi manfaat dan biaya yang tidak sama. Keputusan yang efisien pada tingkat agregat dapat menimbulkan tekanan transisi bagi kelompok tertentu. Oleh sebab itu, desain kebijakan perlu mengidentifikasi aktor, insentif, kapasitas implementasi, dan risiko political capture sejak tahap awal.

Langkah pertama adalah memisahkan tujuan substantif dari instrumen. Pemerintah perlu menjelaskan apa yang ingin dicapai—misalnya stabilitas harga, produktivitas, penciptaan pekerjaan, atau penurunan emisi—sebelum memilih subsidi, pajak, regulasi, transfer, atau investasi publik. Tanpa pemisahan ini, instrumen lama mudah dipertahankan hanya karena memiliki konstituen politik.

Langkah kedua adalah menguji efek distribusi. Siapa yang memperoleh manfaat langsung, siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang mungkin kehilangan akses? Analisis distribusi perlu mencakup rumah tangga menurut pendapatan, wilayah, gender, jenis pekerjaan, serta ukuran usaha. Kompensasi sebaiknya bersifat terarah dan temporer agar tidak menciptakan distorsi baru.

Langkah ketiga adalah memperkuat tata kelola. Data, transparansi, mekanisme pengaduan, audit, dan evaluasi harus menjadi bagian desain, bukan tambahan setelah program berjalan. Ketika kebijakan melibatkan izin, kontrak, atau alokasi sumber daya bernilai besar, pengendalian konflik kepentingan dan keterbukaan proses menjadi sangat penting.

Langkah keempat adalah membangun strategi transisi. Reformasi yang baik jarang dapat dilakukan dalam satu langkah. Tahapan, target antara, dan indikator keluaran perlu dibuat jelas agar pelaku ekonomi mempunyai waktu menyesuaikan. Komunikasi kebijakan yang konsisten mengurangi ketidakpastian dan mencegah resistensi yang muncul semata karena informasi yang tidak lengkap.

Pelajaran ekonomi politik dari kasus ini adalah bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan model ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan membangun koalisi reformasi yang cukup luas tanpa mengorbankan tujuan publik. Reformasi yang teknis benar tetapi tidak memiliki legitimasi mudah dibatalkan; sebaliknya kebijakan yang populer tetapi mengabaikan keberlanjutan akan memindahkan biaya ke masa depan.

Kasus 2. Hilirisasi mineral dan pembangunan daerah

Investasi smelter meningkatkan ekspor tetapi pemerintah daerah menuntut manfaat lokal lebih besar. Kasus hipotetis ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi hampir selalu menghasilkan distribusi manfaat dan biaya yang tidak sama. Keputusan yang efisien pada tingkat agregat dapat menimbulkan tekanan transisi bagi kelompok tertentu. Oleh sebab itu, desain kebijakan perlu mengidentifikasi aktor, insentif, kapasitas implementasi, dan risiko political capture sejak tahap awal.

Langkah pertama adalah memisahkan tujuan substantif dari instrumen. Pemerintah perlu menjelaskan apa yang ingin dicapai—misalnya stabilitas harga, produktivitas, penciptaan pekerjaan, atau penurunan emisi—sebelum memilih subsidi, pajak, regulasi, transfer, atau investasi publik. Tanpa pemisahan ini, instrumen lama mudah dipertahankan hanya karena memiliki konstituen politik.

Langkah kedua adalah menguji efek distribusi. Siapa yang memperoleh manfaat langsung, siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang mungkin kehilangan akses? Analisis distribusi perlu mencakup rumah tangga menurut pendapatan, wilayah, gender, jenis pekerjaan, serta ukuran usaha. Kompensasi sebaiknya bersifat terarah dan temporer agar tidak menciptakan distorsi baru.

Langkah ketiga adalah memperkuat tata kelola. Data, transparansi, mekanisme pengaduan, audit, dan evaluasi harus menjadi bagian desain, bukan tambahan setelah program berjalan. Ketika kebijakan melibatkan izin, kontrak, atau alokasi sumber daya bernilai besar, pengendalian konflik kepentingan dan keterbukaan proses menjadi sangat penting.

Langkah keempat adalah membangun strategi transisi. Reformasi yang baik jarang dapat dilakukan dalam satu langkah. Tahapan, target antara, dan indikator keluaran perlu dibuat jelas agar pelaku ekonomi mempunyai waktu menyesuaikan. Komunikasi kebijakan yang konsisten mengurangi ketidakpastian dan mencegah resistensi yang muncul semata karena informasi yang tidak lengkap.

Pelajaran ekonomi politik dari kasus ini adalah bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan model ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan membangun koalisi reformasi yang cukup luas tanpa mengorbankan tujuan publik. Reformasi yang teknis benar tetapi tidak memiliki legitimasi mudah dibatalkan; sebaliknya kebijakan yang populer tetapi mengabaikan keberlanjutan akan memindahkan biaya ke masa depan.

Kasus 3. Digitalisasi bantuan sosial

Integrasi data menjanjikan ketepatan sasaran tetapi menimbulkan persoalan interoperabilitas dan privasi. Kasus hipotetis ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi hampir selalu menghasilkan distribusi manfaat dan biaya yang tidak sama. Keputusan yang efisien pada tingkat agregat dapat menimbulkan tekanan transisi bagi kelompok tertentu. Oleh sebab itu, desain kebijakan perlu mengidentifikasi aktor, insentif, kapasitas implementasi, dan risiko political capture sejak tahap awal.

Langkah pertama adalah memisahkan tujuan substantif dari instrumen. Pemerintah perlu menjelaskan apa yang ingin dicapai—misalnya stabilitas harga, produktivitas, penciptaan pekerjaan, atau penurunan emisi—sebelum memilih subsidi, pajak, regulasi, transfer, atau investasi publik. Tanpa pemisahan ini, instrumen lama mudah dipertahankan hanya karena memiliki konstituen politik.

Langkah kedua adalah menguji efek distribusi. Siapa yang memperoleh manfaat langsung, siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang mungkin kehilangan akses? Analisis distribusi perlu mencakup rumah tangga menurut pendapatan, wilayah, gender, jenis pekerjaan, serta ukuran usaha. Kompensasi sebaiknya bersifat terarah dan temporer agar tidak menciptakan distorsi baru.

Langkah ketiga adalah memperkuat tata kelola. Data, transparansi, mekanisme pengaduan, audit, dan evaluasi harus menjadi bagian desain, bukan tambahan setelah program berjalan. Ketika kebijakan melibatkan izin, kontrak, atau alokasi sumber daya bernilai besar, pengendalian konflik kepentingan dan keterbukaan proses menjadi sangat penting.

Langkah keempat adalah membangun strategi transisi. Reformasi yang baik jarang dapat dilakukan dalam satu langkah. Tahapan, target antara, dan indikator keluaran perlu dibuat jelas agar pelaku ekonomi mempunyai waktu menyesuaikan. Komunikasi kebijakan yang konsisten mengurangi ketidakpastian dan mencegah resistensi yang muncul semata karena informasi yang tidak lengkap.

Pelajaran ekonomi politik dari kasus ini adalah bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan model ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan membangun koalisi reformasi yang cukup luas tanpa mengorbankan tujuan publik. Reformasi yang teknis benar tetapi tidak memiliki legitimasi mudah dibatalkan; sebaliknya kebijakan yang populer tetapi mengabaikan keberlanjutan akan memindahkan biaya ke masa depan.

Kasus 4. Kenaikan suku bunga dan UMKM

Kebijakan stabilisasi nilai tukar menaikkan biaya kredit bagi usaha kecil. Kasus hipotetis ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi hampir selalu menghasilkan distribusi manfaat dan biaya yang tidak sama. Keputusan yang efisien pada tingkat agregat dapat menimbulkan tekanan transisi bagi kelompok tertentu. Oleh sebab itu, desain kebijakan perlu mengidentifikasi aktor, insentif, kapasitas implementasi, dan risiko political capture sejak tahap awal.

Langkah pertama adalah memisahkan tujuan substantif dari instrumen. Pemerintah perlu menjelaskan apa yang ingin dicapai—misalnya stabilitas harga, produktivitas, penciptaan pekerjaan, atau penurunan emisi—sebelum memilih subsidi, pajak, regulasi, transfer, atau investasi publik. Tanpa pemisahan ini, instrumen lama mudah dipertahankan hanya karena memiliki konstituen politik.

Langkah kedua adalah menguji efek distribusi. Siapa yang memperoleh manfaat langsung, siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang mungkin kehilangan akses? Analisis distribusi perlu mencakup rumah tangga menurut pendapatan, wilayah, gender, jenis pekerjaan, serta ukuran usaha. Kompensasi sebaiknya bersifat terarah dan temporer agar tidak menciptakan distorsi baru.

Langkah ketiga adalah memperkuat tata kelola. Data, transparansi, mekanisme pengaduan, audit, dan evaluasi harus menjadi bagian desain, bukan tambahan setelah program berjalan. Ketika kebijakan melibatkan izin, kontrak, atau alokasi sumber daya bernilai besar, pengendalian konflik kepentingan dan keterbukaan proses menjadi sangat penting.

Langkah keempat adalah membangun strategi transisi. Reformasi yang baik jarang dapat dilakukan dalam satu langkah. Tahapan, target antara, dan indikator keluaran perlu dibuat jelas agar pelaku ekonomi mempunyai waktu menyesuaikan. Komunikasi kebijakan yang konsisten mengurangi ketidakpastian dan mencegah resistensi yang muncul semata karena informasi yang tidak lengkap.

Pelajaran ekonomi politik dari kasus ini adalah bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan model ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan membangun koalisi reformasi yang cukup luas tanpa mengorbankan tujuan publik. Reformasi yang teknis benar tetapi tidak memiliki legitimasi mudah dibatalkan; sebaliknya kebijakan yang populer tetapi mengabaikan keberlanjutan akan memindahkan biaya ke masa depan.

Kasus 5. Perluasan kawasan industri

Pemerintah ingin menarik investasi, sementara masyarakat lokal mempertanyakan penggunaan lahan dan kualitas pekerjaan. Kasus hipotetis ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi hampir selalu menghasilkan distribusi manfaat dan biaya yang tidak sama. Keputusan yang efisien pada tingkat agregat dapat menimbulkan tekanan transisi bagi kelompok tertentu. Oleh sebab itu, desain kebijakan perlu mengidentifikasi aktor, insentif, kapasitas implementasi, dan risiko political capture sejak tahap awal.

Langkah pertama adalah memisahkan tujuan substantif dari instrumen. Pemerintah perlu menjelaskan apa yang ingin dicapai—misalnya stabilitas harga, produktivitas, penciptaan pekerjaan, atau penurunan emisi—sebelum memilih subsidi, pajak, regulasi, transfer, atau investasi publik. Tanpa pemisahan ini, instrumen lama mudah dipertahankan hanya karena memiliki konstituen politik.

Langkah kedua adalah menguji efek distribusi. Siapa yang memperoleh manfaat langsung, siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang mungkin kehilangan akses? Analisis distribusi perlu mencakup rumah tangga menurut pendapatan, wilayah, gender, jenis pekerjaan, serta ukuran usaha. Kompensasi sebaiknya bersifat terarah dan temporer agar tidak menciptakan distorsi baru.

Langkah ketiga adalah memperkuat tata kelola. Data, transparansi, mekanisme pengaduan, audit, dan evaluasi harus menjadi bagian desain, bukan tambahan setelah program berjalan. Ketika kebijakan melibatkan izin, kontrak, atau alokasi sumber daya bernilai besar, pengendalian konflik kepentingan dan keterbukaan proses menjadi sangat penting.

Langkah keempat adalah membangun strategi transisi. Reformasi yang baik jarang dapat dilakukan dalam satu langkah. Tahapan, target antara, dan indikator keluaran perlu dibuat jelas agar pelaku ekonomi mempunyai waktu menyesuaikan. Komunikasi kebijakan yang konsisten mengurangi ketidakpastian dan mencegah resistensi yang muncul semata karena informasi yang tidak lengkap.

Pelajaran ekonomi politik dari kasus ini adalah bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan model ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan membangun koalisi reformasi yang cukup luas tanpa mengorbankan tujuan publik. Reformasi yang teknis benar tetapi tidak memiliki legitimasi mudah dibatalkan; sebaliknya kebijakan yang populer tetapi mengabaikan keberlanjutan akan memindahkan biaya ke masa depan.

Kasus 6. Reformasi pajak

Perluasan basis pajak diperlukan untuk ruang fiskal, tetapi kelompok usaha menuntut kepastian dan simplifikasi. Kasus hipotetis ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi hampir selalu menghasilkan distribusi manfaat dan biaya yang tidak sama. Keputusan yang efisien pada tingkat agregat dapat menimbulkan tekanan transisi bagi kelompok tertentu. Oleh sebab itu, desain kebijakan perlu mengidentifikasi aktor, insentif, kapasitas implementasi, dan risiko political capture sejak tahap awal.

Langkah pertama adalah memisahkan tujuan substantif dari instrumen. Pemerintah perlu menjelaskan apa yang ingin dicapai—misalnya stabilitas harga, produktivitas, penciptaan pekerjaan, atau penurunan emisi—sebelum memilih subsidi, pajak, regulasi, transfer, atau investasi publik. Tanpa pemisahan ini, instrumen lama mudah dipertahankan hanya karena memiliki konstituen politik.

Langkah kedua adalah menguji efek distribusi. Siapa yang memperoleh manfaat langsung, siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang mungkin kehilangan akses? Analisis distribusi perlu mencakup rumah tangga menurut pendapatan, wilayah, gender, jenis pekerjaan, serta ukuran usaha. Kompensasi sebaiknya bersifat terarah dan temporer agar tidak menciptakan distorsi baru.

Langkah ketiga adalah memperkuat tata kelola. Data, transparansi, mekanisme pengaduan, audit, dan evaluasi harus menjadi bagian desain, bukan tambahan setelah program berjalan. Ketika kebijakan melibatkan izin, kontrak, atau alokasi sumber daya bernilai besar, pengendalian konflik kepentingan dan keterbukaan proses menjadi sangat penting.

Langkah keempat adalah membangun strategi transisi. Reformasi yang baik jarang dapat dilakukan dalam satu langkah. Tahapan, target antara, dan indikator keluaran perlu dibuat jelas agar pelaku ekonomi mempunyai waktu menyesuaikan. Komunikasi kebijakan yang konsisten mengurangi ketidakpastian dan mencegah resistensi yang muncul semata karena informasi yang tidak lengkap.

Pelajaran ekonomi politik dari kasus ini adalah bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan model ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan membangun koalisi reformasi yang cukup luas tanpa mengorbankan tujuan publik. Reformasi yang teknis benar tetapi tidak memiliki legitimasi mudah dibatalkan; sebaliknya kebijakan yang populer tetapi mengabaikan keberlanjutan akan memindahkan biaya ke masa depan.

Kasus 7. Pengadaan pemerintah digital

E-procurement menekan biaya transaksi, namun risiko kolusi dapat berpindah ke desain spesifikasi dan konsolidasi vendor. Kasus hipotetis ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi hampir selalu menghasilkan distribusi manfaat dan biaya yang tidak sama. Keputusan yang efisien pada tingkat agregat dapat menimbulkan tekanan transisi bagi kelompok tertentu. Oleh sebab itu, desain kebijakan perlu mengidentifikasi aktor, insentif, kapasitas implementasi, dan risiko political capture sejak tahap awal.

Langkah pertama adalah memisahkan tujuan substantif dari instrumen. Pemerintah perlu menjelaskan apa yang ingin dicapai—misalnya stabilitas harga, produktivitas, penciptaan pekerjaan, atau penurunan emisi—sebelum memilih subsidi, pajak, regulasi, transfer, atau investasi publik. Tanpa pemisahan ini, instrumen lama mudah dipertahankan hanya karena memiliki konstituen politik.

Langkah kedua adalah menguji efek distribusi. Siapa yang memperoleh manfaat langsung, siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang mungkin kehilangan akses? Analisis distribusi perlu mencakup rumah tangga menurut pendapatan, wilayah, gender, jenis pekerjaan, serta ukuran usaha. Kompensasi sebaiknya bersifat terarah dan temporer agar tidak menciptakan distorsi baru.

Langkah ketiga adalah memperkuat tata kelola. Data, transparansi, mekanisme pengaduan, audit, dan evaluasi harus menjadi bagian desain, bukan tambahan setelah program berjalan. Ketika kebijakan melibatkan izin, kontrak, atau alokasi sumber daya bernilai besar, pengendalian konflik kepentingan dan keterbukaan proses menjadi sangat penting.

Langkah keempat adalah membangun strategi transisi. Reformasi yang baik jarang dapat dilakukan dalam satu langkah. Tahapan, target antara, dan indikator keluaran perlu dibuat jelas agar pelaku

ekonomi mempunyai waktu menyesuaikan. Komunikasi kebijakan yang konsisten mengurangi ketidakpastian dan mencegah resistensi yang muncul semata karena informasi yang tidak lengkap.

Pelajaran ekonomi politik dari kasus ini adalah bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan model ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan membangun koalisi reformasi yang cukup luas tanpa mengorbankan tujuan publik. Reformasi yang teknis benar tetapi tidak memiliki legitimasi mudah dibatalkan; sebaliknya kebijakan yang populer tetapi mengabaikan keberlanjutan akan memindahkan biaya ke masa depan.

Kasus 8. Ketahanan pangan

Pemerintah ingin menjaga harga konsumen sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Kasus hipotetis ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi hampir selalu menghasilkan distribusi manfaat dan biaya yang tidak sama. Keputusan yang efisien pada tingkat agregat dapat menimbulkan tekanan transisi bagi kelompok tertentu. Oleh sebab itu, desain kebijakan perlu mengidentifikasi aktor, insentif, kapasitas implementasi, dan risiko political capture sejak tahap awal.

Langkah pertama adalah memisahkan tujuan substantif dari instrumen. Pemerintah perlu menjelaskan apa yang ingin dicapai—misalnya stabilitas harga, produktivitas, penciptaan pekerjaan, atau penurunan emisi—sebelum memilih subsidi, pajak, regulasi, transfer, atau investasi publik. Tanpa pemisahan ini, instrumen lama mudah dipertahankan hanya karena memiliki konstituen politik.

Langkah kedua adalah menguji efek distribusi. Siapa yang memperoleh manfaat langsung, siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang mungkin kehilangan akses? Analisis distribusi perlu mencakup rumah tangga menurut pendapatan, wilayah, gender, jenis pekerjaan, serta ukuran usaha. Kompensasi sebaiknya bersifat terarah dan temporer agar tidak menciptakan distorsi baru.

Langkah ketiga adalah memperkuat tata kelola. Data, transparansi, mekanisme pengaduan, audit, dan evaluasi harus menjadi bagian desain, bukan tambahan setelah program berjalan. Ketika kebijakan melibatkan izin, kontrak, atau alokasi sumber daya bernilai besar, pengendalian konflik kepentingan dan keterbukaan proses menjadi sangat penting.

Langkah keempat adalah membangun strategi transisi. Reformasi yang baik jarang dapat dilakukan dalam satu langkah. Tahapan, target antara, dan indikator keluaran perlu dibuat jelas agar pelaku ekonomi mempunyai waktu menyesuaikan. Komunikasi kebijakan yang konsisten mengurangi ketidakpastian dan mencegah resistensi yang muncul semata karena informasi yang tidak lengkap.

Pelajaran ekonomi politik dari kasus ini adalah bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan model ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan membangun koalisi reformasi yang cukup luas tanpa mengorbankan tujuan publik. Reformasi yang teknis benar tetapi tidak memiliki legitimasi mudah dibatalkan; sebaliknya kebijakan yang populer tetapi mengabaikan keberlanjutan akan memindahkan biaya ke masa depan.

Kasus 9. Transisi energi

Percepatan energi bersih menciptakan peluang investasi namun mengubah prospek daerah yang bergantung pada batu bara. Kasus hipotetis ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi hampir selalu menghasilkan distribusi manfaat dan biaya yang tidak sama. Keputusan yang efisien pada tingkat

agregat dapat menimbulkan tekanan transisi bagi kelompok tertentu. Oleh sebab itu, desain kebijakan perlu mengidentifikasi aktor, insentif, kapasitas implementasi, dan risiko political capture sejak tahap awal.

Langkah pertama adalah memisahkan tujuan substantif dari instrumen. Pemerintah perlu menjelaskan apa yang ingin dicapai—misalnya stabilitas harga, produktivitas, penciptaan pekerjaan, atau penurunan emisi—sebelum memilih subsidi, pajak, regulasi, transfer, atau investasi publik. Tanpa pemisahan ini, instrumen lama mudah dipertahankan hanya karena memiliki konstituen politik.

Langkah kedua adalah menguji efek distribusi. Siapa yang memperoleh manfaat langsung, siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang mungkin kehilangan akses? Analisis distribusi perlu mencakup rumah tangga menurut pendapatan, wilayah, gender, jenis pekerjaan, serta ukuran usaha. Kompensasi sebaiknya bersifat terarah dan temporer agar tidak menciptakan distorsi baru.

Langkah ketiga adalah memperkuat tata kelola. Data, transparansi, mekanisme pengaduan, audit, dan evaluasi harus menjadi bagian desain, bukan tambahan setelah program berjalan. Ketika kebijakan melibatkan izin, kontrak, atau alokasi sumber daya bernilai besar, pengendalian konflik kepentingan dan keterbukaan proses menjadi sangat penting.

Langkah keempat adalah membangun strategi transisi. Reformasi yang baik jarang dapat dilakukan dalam satu langkah. Tahapan, target antara, dan indikator keluaran perlu dibuat jelas agar pelaku ekonomi mempunyai waktu menyesuaikan. Komunikasi kebijakan yang konsisten mengurangi ketidakpastian dan mencegah resistensi yang muncul semata karena informasi yang tidak lengkap.

Pelajaran ekonomi politik dari kasus ini adalah bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan model ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan membangun koalisi reformasi yang cukup luas tanpa mengorbankan tujuan publik. Reformasi yang teknis benar tetapi tidak memiliki legitimasi mudah dibatalkan; sebaliknya kebijakan yang populer tetapi mengabaikan keberlanjutan akan memindahkan biaya ke masa depan.

Kasus 10. AI di sektor jasa

Perusahaan mengadopsi AI untuk efisiensi, sementara pekerja menghadapi perubahan tugas dan kebutuhan reskilling. Kasus hipotetis ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi hampir selalu menghasilkan distribusi manfaat dan biaya yang tidak sama. Keputusan yang efisien pada tingkat agregat dapat menimbulkan tekanan transisi bagi kelompok tertentu. Oleh sebab itu, desain kebijakan perlu mengidentifikasi aktor, insentif, kapasitas implementasi, dan risiko political capture sejak tahap awal.

Langkah pertama adalah memisahkan tujuan substantif dari instrumen. Pemerintah perlu menjelaskan apa yang ingin dicapai—misalnya stabilitas harga, produktivitas, penciptaan pekerjaan, atau penurunan emisi—sebelum memilih subsidi, pajak, regulasi, transfer, atau investasi publik. Tanpa pemisahan ini, instrumen lama mudah dipertahankan hanya karena memiliki konstituen politik.

Langkah kedua adalah menguji efek distribusi. Siapa yang memperoleh manfaat langsung, siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang mungkin kehilangan akses? Analisis distribusi perlu mencakup rumah tangga menurut pendapatan, wilayah, gender, jenis pekerjaan, serta ukuran usaha. Kompensasi sebaiknya bersifat terarah dan temporer agar tidak menciptakan distorsi baru.

Langkah ketiga adalah memperkuat tata kelola. Data, transparansi, mekanisme pengaduan, audit, dan evaluasi harus menjadi bagian desain, bukan tambahan setelah program berjalan. Ketika kebijakan melibatkan izin, kontrak, atau alokasi sumber daya bernilai besar, pengendalian konflik kepentingan dan keterbukaan proses menjadi sangat penting.

Langkah keempat adalah membangun strategi transisi. Reformasi yang baik jarang dapat dilakukan dalam satu langkah. Tahapan, target antara, dan indikator keluaran perlu dibuat jelas agar pelaku ekonomi mempunyai waktu menyesuaikan. Komunikasi kebijakan yang konsisten mengurangi ketidakpastian dan mencegah resistensi yang muncul semata karena informasi yang tidak lengkap.

Pelajaran ekonomi politik dari kasus ini adalah bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan model ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan membangun koalisi reformasi yang cukup luas tanpa mengorbankan tujuan publik. Reformasi yang teknis benar tetapi tidak memiliki legitimasi mudah dibatalkan; sebaliknya kebijakan yang populer tetapi mengabaikan keberlanjutan akan memindahkan biaya ke masa depan.

Kasus 11. Transfer fiskal ke daerah

Daerah membutuhkan fleksibilitas, tetapi pusat menuntut akuntabilitas hasil dan standar layanan. Kasus hipotetis ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi hampir selalu menghasilkan distribusi manfaat dan biaya yang tidak sama. Keputusan yang efisien pada tingkat agregat dapat menimbulkan tekanan transisi bagi kelompok tertentu. Oleh sebab itu, desain kebijakan perlu mengidentifikasi aktor, insentif, kapasitas implementasi, dan risiko political capture sejak tahap awal.

Langkah pertama adalah memisahkan tujuan substantif dari instrumen. Pemerintah perlu menjelaskan apa yang ingin dicapai—misalnya stabilitas harga, produktivitas, penciptaan pekerjaan, atau penurunan emisi—sebelum memilih subsidi, pajak, regulasi, transfer, atau investasi publik. Tanpa pemisahan ini, instrumen lama mudah dipertahankan hanya karena memiliki konstituen politik.

Langkah kedua adalah menguji efek distribusi. Siapa yang memperoleh manfaat langsung, siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang mungkin kehilangan akses? Analisis distribusi perlu mencakup rumah tangga menurut pendapatan, wilayah, gender, jenis pekerjaan, serta ukuran usaha. Kompensasi sebaiknya bersifat terarah dan temporer agar tidak menciptakan distorsi baru.

Langkah ketiga adalah memperkuat tata kelola. Data, transparansi, mekanisme pengaduan, audit, dan evaluasi harus menjadi bagian desain, bukan tambahan setelah program berjalan. Ketika kebijakan melibatkan izin, kontrak, atau alokasi sumber daya bernilai besar, pengendalian konflik kepentingan dan keterbukaan proses menjadi sangat penting.

Langkah keempat adalah membangun strategi transisi. Reformasi yang baik jarang dapat dilakukan dalam satu langkah. Tahapan, target antara, dan indikator keluaran perlu dibuat jelas agar pelaku ekonomi mempunyai waktu menyesuaikan. Komunikasi kebijakan yang konsisten mengurangi ketidakpastian dan mencegah resistensi yang muncul semata karena informasi yang tidak lengkap.

Pelajaran ekonomi politik dari kasus ini adalah bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan model ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan membangun koalisi reformasi yang cukup luas tanpa mengorbankan tujuan publik. Reformasi yang teknis benar tetapi tidak memiliki legitimasi mudah

dibatalkan; sebaliknya kebijakan yang populer tetapi mengabaikan keberlanjutan akan memindahkan biaya ke masa depan.

Kasus 12. Program perlindungan kelas menengah rentan

Pemerintah merancang dukungan temporer untuk rumah tangga yang terdampak guncangan biaya hidup. Kasus hipotetis ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi hampir selalu menghasilkan distribusi manfaat dan biaya yang tidak sama. Keputusan yang efisien pada tingkat agregat dapat menimbulkan tekanan transisi bagi kelompok tertentu. Oleh sebab itu, desain kebijakan perlu mengidentifikasi aktor, insentif, kapasitas implementasi, dan risiko political capture sejak tahap awal.

Langkah pertama adalah memisahkan tujuan substantif dari instrumen. Pemerintah perlu menjelaskan apa yang ingin dicapai—misalnya stabilitas harga, produktivitas, penciptaan pekerjaan, atau penurunan emisi—sebelum memilih subsidi, pajak, regulasi, transfer, atau investasi publik. Tanpa pemisahan ini, instrumen lama mudah dipertahankan hanya karena memiliki konstituen politik.

Langkah kedua adalah menguji efek distribusi. Siapa yang memperoleh manfaat langsung, siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang mungkin kehilangan akses? Analisis distribusi perlu mencakup rumah tangga menurut pendapatan, wilayah, gender, jenis pekerjaan, serta ukuran usaha. Kompensasi sebaiknya bersifat terarah dan temporer agar tidak menciptakan distorsi baru.

Langkah ketiga adalah memperkuat tata kelola. Data, transparansi, mekanisme pengaduan, audit, dan evaluasi harus menjadi bagian desain, bukan tambahan setelah program berjalan. Ketika kebijakan melibatkan izin, kontrak, atau alokasi sumber daya bernilai besar, pengendalian konflik kepentingan dan keterbukaan proses menjadi sangat penting.

Langkah keempat adalah membangun strategi transisi. Reformasi yang baik jarang dapat dilakukan dalam satu langkah. Tahapan, target antara, dan indikator keluaran perlu dibuat jelas agar pelaku ekonomi mempunyai waktu menyesuaikan. Komunikasi kebijakan yang konsisten mengurangi ketidakpastian dan mencegah resistensi yang muncul semata karena informasi yang tidak lengkap.

Pelajaran ekonomi politik dari kasus ini adalah bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan model ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan membangun koalisi reformasi yang cukup luas tanpa mengorbankan tujuan publik. Reformasi yang teknis benar tetapi tidak memiliki legitimasi mudah dibatalkan; sebaliknya kebijakan yang populer tetapi mengabaikan keberlanjutan akan memindahkan biaya ke masa depan.

Lampiran Analitis II: Esai Tematik untuk Pendalaman

1. Pertumbuhan dan Legitimasi Sosial

Pertumbuhan ekonomi memperoleh legitimasi ketika masyarakat merasakan hubungan yang masuk akal antara peningkatan aktivitas ekonomi dengan perbaikan kehidupan sehari-hari. Dalam praktik pembangunan, hubungan ini sering tidak langsung. Perubahan pada pekerjaan dapat memperbaiki indikator ekonomi, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sangat bergantung pada upah riil dan pelayanan publik. Karena itu, analisis harus bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan' menuju 'bagaimana pertumbuhan dihasilkan, siapa yang berpartisipasi, dan apa yang diwariskan

kepada periode berikutnya'. Perspektif semacam ini penting bagi Indonesia karena ukuran ekonomi yang besar membuat kebijakan nasional selalu bertemu dengan variasi daerah, struktur sosial, dan kapasitas institusi yang sangat beragam.

Salah satu persoalan utama adalah adanya jarak antara indikator agregat dan pengalaman mikro. Pada tingkat nasional, upah riil dapat tampak membaik, tetapi rumah tangga tertentu mungkin tetap menghadapi biaya tinggi, ketidakpastian pekerjaan, atau kualitas layanan yang rendah. Ekonomi politik memeriksa jarak tersebut melalui distribusi pendapatan, kepemilikan aset, akses terhadap jaringan, dan posisi tawar. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya diarahkan untuk memperbesar kue ekonomi, tetapi juga untuk memperbaiki aturan pembagian kesempatan sehingga lebih banyak orang mampu ikut menghasilkan nilai tambah.

Dimensi institusional menjadi penting karena pelayanan publik tidak berkembang di ruang hampa. Aturan formal, praktik birokrasi, kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, dan mekanisme pengawasan membentuk perilaku aktor. Ketika pelaku usaha percaya bahwa aturan konsisten dan sengketa dapat diselesaikan secara adil, horizon investasi menjadi lebih panjang. Ketika warga percaya bahwa program publik dikelola transparan, kepatuhan meningkat. Sebaliknya, ketidakpastian regulasi dan persepsi ketidakadilan mendorong perilaku defensif: investasi ditunda, tabungan dipindahkan, atau energi dialihkan untuk mencari akses khusus.

Persoalan perumahan juga menunjukkan adanya trade-off waktu. Kebijakan jangka pendek sering dibutuhkan untuk menahan guncangan, tetapi perlindungan yang terlalu lama dapat mengunci struktur lama. Subsidi, proteksi, atau insentif investasi perlu memiliki tujuan, indikator keberhasilan, dan mekanisme penghentian yang jelas. Jika tidak, kebijakan dapat berubah menjadi hak istimewa yang sulit dicabut. Ekonomi politik membantu menjelaskan mengapa kebijakan semacam itu bertahan: penerima manfaat biasanya terorganisasi, sedangkan biaya tersebar kepada banyak pembayar pajak dan konsumen.

Dari sisi pembangunan manusia, mobilitas sosial harus ditempatkan sebagai tujuan sekaligus sarana. Individu yang sehat, terdidik, aman, dan memiliki keterampilan dapat berpartisipasi lebih produktif dalam ekonomi. Namun investasi manusia tidak cukup jika struktur ekonomi tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai. Karena itu, pendidikan, industri, pasar kerja, dan kebijakan inovasi perlu dirancang sebagai satu ekosistem. Ketidakesesuaian di antara keempatnya menghasilkan lulusan tanpa pekerjaan yang tepat, perusahaan yang kekurangan keterampilan, dan produktivitas yang stagnan.

Indonesia juga perlu membedakan antara pemerataan hasil dan pemerataan kesempatan. Pemerataan hasil tertentu diperlukan untuk menjaga standar hidup minimum, tetapi pembangunan jangka panjang menuntut perluasan kesempatan melalui pendidikan bermutu, akses kesehatan, konektivitas, pembiayaan, dan kepastian hukum. Kesempatan yang lebih merata memperbesar basis talenta nasional dan mengurangi ketergantungan pada jaringan sosial tertentu. Dalam ekonomi modern, kemampuan menemukan dan memanfaatkan talenta dari seluruh lapisan masyarakat merupakan sumber keunggulan yang sama pentingnya dengan modal fisik.

Pada tingkat kebijakan, koordinasi menjadi faktor penentu. Program yang berkaitan dengan pekerjaan, upah riil, pelayanan publik, perumahan, dan mobilitas sosial hampir selalu melintasi batas kementerian dan pemerintahan daerah. Tanpa arsitektur koordinasi, setiap lembaga dapat mencapai target sektoral

tetapi hasil keseluruhan tetap lemah. Pendekatan whole-of-government memerlukan data bersama, definisi indikator yang konsisten, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme eskalasi masalah. Koordinasi bukan berarti sentralisasi semua keputusan; banyak keputusan justru lebih efektif ketika kewenangan didelegasikan kepada unit yang paling dekat dengan informasi.

Dalam perspektif ekonomi politik, reformasi berkelanjutan membutuhkan koalisi sosial. Kebijakan yang hanya dimiliki oleh satu kementerian atau satu periode pemerintahan rentan berubah. Sebaliknya, ketika dunia usaha, pekerja, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan warga memahami tujuan reformasi, biaya politik untuk membatalkan kebijakan yang baik menjadi lebih tinggi. Konsultasi publik karena itu bukan sekadar prosedur, tetapi instrumen membangun informasi dan legitimasi. Proses tersebut tetap membutuhkan kepemimpinan agar konsultasi tidak berubah menjadi veto tanpa akhir.

Pengukuran hasil harus bergeser dari input menuju outcome. Besarnya anggaran, jumlah pelatihan, jumlah izin yang diterbitkan, atau panjang infrastruktur hanya mempunyai arti jika meningkatkan produktivitas, pendapatan, akses, dan kualitas hidup. Pemerintah perlu membangun budaya evaluasi yang menerima kemungkinan bahwa program dapat gagal atau perlu diubah. Kegagalan yang terdeteksi melalui evaluasi bukan tanda kelemahan; yang lebih berbahaya adalah mempertahankan program yang tidak efektif karena alasan politik atau reputasi.

Pada akhirnya, tema ini kembali pada tiga kata kunci artikel: pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan. Pertumbuhan menyediakan sumber daya, stabilitas menciptakan ruang untuk keputusan jangka panjang, dan kesejahteraan memberi tujuan normatif. Ketiganya harus diikat oleh institusi yang kredibel dan kemampuan belajar. Indonesia 2026 memiliki modal penting berupa skala pasar, demografi, sumber daya, posisi geopolitik, dan pengalaman menghadapi krisis. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi produktivitas yang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih luas melalui pilihan kebijakan yang konsisten melampaui siklus politik.

2. Stabilitas Makro dan Rasa Aman Ekonomi

Stabilitas makroekonomi pada akhirnya harus diterjemahkan menjadi rasa aman ekonomi bagi rumah tangga dan kepastian bagi pelaku usaha. Dalam praktik pembangunan, hubungan ini sering tidak langsung. Perubahan pada inflasi dapat memperbaiki indikator ekonomi, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sangat bergantung pada nilai tukar dan tabungan. Karena itu, analisis harus bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan' menuju 'bagaimana pertumbuhan dihasilkan, siapa yang berpartisipasi, dan apa yang diwariskan kepada periode berikutnya'. Perspektif semacam ini penting bagi Indonesia karena ukuran ekonomi yang besar membuat kebijakan nasional selalu bertemu dengan variasi daerah, struktur sosial, dan kapasitas institusi yang sangat beragam.

Salah satu persoalan utama adalah adanya jarak antara indikator agregat dan pengalaman mikro. Pada tingkat nasional, nilai tukar dapat tampak membaik, tetapi rumah tangga tertentu mungkin tetap menghadapi biaya tinggi, ketidakpastian pekerjaan, atau kualitas layanan yang rendah. Ekonomi politik memeriksa jarak tersebut melalui distribusi pendapatan, kepemilikan aset, akses terhadap jaringan, dan posisi tawar. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya diarahkan untuk memperbesar kue ekonomi, tetapi juga untuk memperbaiki aturan pembagian kesempatan sehingga lebih banyak orang mampu ikut menghasilkan nilai tambah.

Dimensi institusional menjadi penting karena tabungan tidak berkembang di ruang hampa. Aturan formal, praktik birokrasi, kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, dan mekanisme pengawasan membentuk perilaku aktor. Ketika pelaku usaha percaya bahwa aturan konsisten dan sengketa dapat diselesaikan secara adil, horizon investasi menjadi lebih panjang. Ketika warga percaya bahwa program publik dikelola transparan, kepatuhan meningkat. Sebaliknya, ketidakpastian regulasi dan persepsi ketidakadilan mendorong perilaku defensif: investasi ditunda, tabungan dipindahkan, atau energi dialihkan untuk mencari akses khusus.

Persoalan kredit juga menunjukkan adanya trade-off waktu. Kebijakan jangka pendek sering dibutuhkan untuk menahan guncangan, tetapi perlindungan yang terlalu lama dapat mengunci struktur lama. Subsidi, proteksi, atau insentif investasi perlu memiliki tujuan, indikator keberhasilan, dan mekanisme penghentian yang jelas. Jika tidak, kebijakan dapat berubah menjadi hak istimewa yang sulit dicabut. Ekonomi politik membantu menjelaskan mengapa kebijakan semacam itu bertahan: penerima manfaat biasanya terorganisasi, sedangkan biaya tersebar kepada banyak pembayar pajak dan konsumen.

Dari sisi pembangunan manusia, ekspektasi harus ditempatkan sebagai tujuan sekaligus sarana. Individu yang sehat, terdidik, aman, dan memiliki keterampilan dapat berpartisipasi lebih produktif dalam ekonomi. Namun investasi manusia tidak cukup jika struktur ekonomi tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai. Karena itu, pendidikan, industri, pasar kerja, dan kebijakan inovasi perlu dirancang sebagai satu ekosistem. Ketidakesesuaian di antara keempatnya menghasilkan lulusan tanpa pekerjaan yang tepat, perusahaan yang kekurangan keterampilan, dan produktivitas yang stagnan.

Indonesia juga perlu membedakan antara pemerataan hasil dan pemerataan kesempatan. Pemerataan hasil tertentu diperlukan untuk menjaga standar hidup minimum, tetapi pembangunan jangka panjang menuntut perluasan kesempatan melalui pendidikan bermutu, akses kesehatan, konektivitas, pembiayaan, dan kepastian hukum. Kesempatan yang lebih merata memperbesar basis talenta nasional dan mengurangi ketergantungan pada jaringan sosial tertentu. Dalam ekonomi modern, kemampuan menemukan dan memanfaatkan talenta dari seluruh lapisan masyarakat merupakan sumber keunggulan yang sama pentingnya dengan modal fisik.

Pada tingkat kebijakan, koordinasi menjadi faktor penentu. Program yang berkaitan dengan inflasi, nilai tukar, tabungan, kredit, dan ekspektasi hampir selalu melintasi batas kementerian dan pemerintahan daerah. Tanpa arsitektur koordinasi, setiap lembaga dapat mencapai target sektoral tetapi hasil keseluruhan tetap lemah. Pendekatan whole-of-government memerlukan data bersama, definisi indikator yang konsisten, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme eskalasi masalah. Koordinasi bukan berarti sentralisasi semua keputusan; banyak keputusan justru lebih efektif ketika kewenangan didelegasikan kepada unit yang paling dekat dengan informasi.

Dalam perspektif ekonomi politik, reformasi berkelanjutan membutuhkan koalisi sosial. Kebijakan yang hanya dimiliki oleh satu kementerian atau satu periode pemerintahan rentan berubah. Sebaliknya, ketika dunia usaha, pekerja, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan warga memahami tujuan reformasi, biaya politik untuk membatalkan kebijakan yang baik menjadi lebih tinggi. Konsultasi publik karena itu bukan sekadar prosedur, tetapi instrumen membangun informasi dan legitimasi. Proses tersebut tetap membutuhkan kepemimpinan agar konsultasi tidak berubah menjadi veto tanpa akhir.

Pengukuran hasil harus bergeser dari input menuju outcome. Besarnya anggaran, jumlah pelatihan, jumlah izin yang diterbitkan, atau panjang infrastruktur hanya mempunyai arti jika meningkatkan produktivitas, pendapatan, akses, dan kualitas hidup. Pemerintah perlu membangun budaya evaluasi yang menerima kemungkinan bahwa program dapat gagal atau perlu diubah. Kegagalan yang terdeteksi melalui evaluasi bukan tanda kelemahan; yang lebih berbahaya adalah mempertahankan program yang tidak efektif karena alasan politik atau reputasi.

Pada akhirnya, tema ini kembali pada tiga kata kunci artikel: pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan. Pertumbuhan menyediakan sumber daya, stabilitas menciptakan ruang untuk keputusan jangka panjang, dan kesejahteraan memberi tujuan normatif. Ketiganya harus diikat oleh institusi yang kredibel dan kemampuan belajar. Indonesia 2026 memiliki modal penting berupa skala pasar, demografi, sumber daya, posisi geopolitik, dan pengalaman menghadapi krisis. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi produktivitas yang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih luas melalui pilihan kebijakan yang konsisten melampaui siklus politik.

3. Kelas Menengah sebagai Penyangga Demokrasi dan Ekonomi

Kelas menengah tidak hanya penting sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pembayar pajak, tenaga profesional, wirausaha, dan basis tuntutan terhadap tata kelola yang lebih baik. Dalam praktik pembangunan, hubungan ini sering tidak langsung. Perubahan pada konsumsi dapat memperbaiki indikator ekonomi, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sangat bergantung pada pendidikan dan kepemilikan aset. Karena itu, analisis harus bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan' menuju 'bagaimana pertumbuhan dihasilkan, siapa yang berpartisipasi, dan apa yang diwariskan kepada periode berikutnya'. Perspektif semacam ini penting bagi Indonesia karena ukuran ekonomi yang besar membuat kebijakan nasional selalu bertemu dengan variasi daerah, struktur sosial, dan kapasitas institusi yang sangat beragam.

Salah satu persoalan utama adalah adanya jarak antara indikator agregat dan pengalaman mikro. Pada tingkat nasional, pendidikan dapat tampak membaik, tetapi rumah tangga tertentu mungkin tetap menghadapi biaya tinggi, ketidakpastian pekerjaan, atau kualitas layanan yang rendah. Ekonomi politik memeriksa jarak tersebut melalui distribusi pendapatan, kepemilikan aset, akses terhadap jaringan, dan posisi tawar. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya diarahkan untuk memperbesar kue ekonomi, tetapi juga untuk memperbaiki aturan pembagian kesempatan sehingga lebih banyak orang mampu ikut menghasilkan nilai tambah.

Dimensi institusional menjadi penting karena kepemilikan aset tidak berkembang di ruang hampa. Aturan formal, praktik birokrasi, kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, dan mekanisme pengawasan membentuk perilaku aktor. Ketika pelaku usaha percaya bahwa aturan konsisten dan sengketa dapat diselesaikan secara adil, horizon investasi menjadi lebih panjang. Ketika warga percaya bahwa program publik dikelola transparan, kepatuhan meningkat. Sebaliknya, ketidakpastian regulasi dan persepsi ketidakadilan mendorong perilaku defensif: investasi ditunda, tabungan dipindahkan, atau energi dialihkan untuk mencari akses khusus.

Persoalan pajak juga menunjukkan adanya trade-off waktu. Kebijakan jangka pendek sering dibutuhkan untuk menahan guncangan, tetapi perlindungan yang terlalu lama dapat mengunci struktur lama. Subsidi, proteksi, atau insentif investasi perlu memiliki tujuan, indikator keberhasilan, dan mekanisme

penghentian yang jelas. Jika tidak, kebijakan dapat berubah menjadi hak istimewa yang sulit dicabut. Ekonomi politik membantu menjelaskan mengapa kebijakan semacam itu bertahan: penerima manfaat biasanya terorganisasi, sedangkan biaya tersebar kepada banyak pembayar pajak dan konsumen.

Dari sisi pembangunan manusia, partisipasi harus ditempatkan sebagai tujuan sekaligus sarana. Individu yang sehat, terdidik, aman, dan memiliki keterampilan dapat berpartisipasi lebih produktif dalam ekonomi. Namun investasi manusia tidak cukup jika struktur ekonomi tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai. Karena itu, pendidikan, industri, pasar kerja, dan kebijakan inovasi perlu dirancang sebagai satu ekosistem. Ketidaksesuaian di antara keempatnya menghasilkan lulusan tanpa pekerjaan yang tepat, perusahaan yang kekurangan keterampilan, dan produktivitas yang stagnan.

Indonesia juga perlu membedakan antara pemerataan hasil dan pemerataan kesempatan. Pemerataan hasil tertentu diperlukan untuk menjaga standar hidup minimum, tetapi pembangunan jangka panjang menuntut perluasan kesempatan melalui pendidikan bermutu, akses kesehatan, konektivitas, pembiayaan, dan kepastian hukum. Kesempatan yang lebih merata memperbesar basis talenta nasional dan mengurangi ketergantungan pada jaringan sosial tertentu. Dalam ekonomi modern, kemampuan menemukan dan memanfaatkan talenta dari seluruh lapisan masyarakat merupakan sumber keunggulan yang sama pentingnya dengan modal fisik.

Pada tingkat kebijakan, koordinasi menjadi faktor penentu. Program yang berkaitan dengan konsumsi, pendidikan, kepemilikan aset, pajak, dan partisipasi hampir selalu melintasi batas kementerian dan pemerintahan daerah. Tanpa arsitektur koordinasi, setiap lembaga dapat mencapai target sektoral tetapi hasil keseluruhan tetap lemah. Pendekatan whole-of-government memerlukan data bersama, definisi indikator yang konsisten, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme eskalasi masalah. Koordinasi bukan berarti sentralisasi semua keputusan; banyak keputusan justru lebih efektif ketika kewenangan didelegasikan kepada unit yang paling dekat dengan informasi.

Dalam perspektif ekonomi politik, reformasi berkelanjutan membutuhkan koalisi sosial. Kebijakan yang hanya dimiliki oleh satu kementerian atau satu periode pemerintahan rentan berubah. Sebaliknya, ketika dunia usaha, pekerja, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan warga memahami tujuan reformasi, biaya politik untuk membatalkan kebijakan yang baik menjadi lebih tinggi. Konsultasi publik karena itu bukan sekadar prosedur, tetapi instrumen membangun informasi dan legitimasi. Proses tersebut tetap membutuhkan kepemimpinan agar konsultasi tidak berubah menjadi veto tanpa akhir.

Pengukuran hasil harus bergeser dari input menuju outcome. Besarnya anggaran, jumlah pelatihan, jumlah izin yang diterbitkan, atau panjang infrastruktur hanya mempunyai arti jika meningkatkan produktivitas, pendapatan, akses, dan kualitas hidup. Pemerintah perlu membangun budaya evaluasi yang menerima kemungkinan bahwa program dapat gagal atau perlu diubah. Kegagalan yang terdeteksi melalui evaluasi bukan tanda kelemahan; yang lebih berbahaya adalah mempertahankan program yang tidak efektif karena alasan politik atau reputasi.

Pada akhirnya, tema ini kembali pada tiga kata kunci artikel: pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan. Pertumbuhan menyediakan sumber daya, stabilitas menciptakan ruang untuk keputusan jangka panjang, dan kesejahteraan memberi tujuan normatif. Ketiganya harus diikat oleh institusi yang kredibel dan kemampuan belajar. Indonesia 2026 memiliki modal penting berupa skala

pasar, demografi, sumber daya, posisi geopolitik, dan pengalaman menghadapi krisis. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi produktivitas yang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih luas melalui pilihan kebijakan yang konsisten melampaui siklus politik.

4. Transformasi Struktural dan Politik Industri

Transformasi struktural memerlukan pergeseran tenaga kerja dan modal ke aktivitas yang lebih produktif, namun proses tersebut menciptakan pemenang dan pihak yang menghadapi biaya penyesuaian. Dalam praktik pembangunan, hubungan ini sering tidak langsung. Perubahan pada manufaktur dapat memperbaiki indikator ekonomi, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sangat bergantung pada jasa modern dan pertanian. Karena itu, analisis harus bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan' menuju 'bagaimana pertumbuhan dihasilkan, siapa yang berpartisipasi, dan apa yang diwariskan kepada periode berikutnya'. Perspektif semacam ini penting bagi Indonesia karena ukuran ekonomi yang besar membuat kebijakan nasional selalu bertemu dengan variasi daerah, struktur sosial, dan kapasitas institusi yang sangat beragam.

Salah satu persoalan utama adalah adanya jarak antara indikator agregat dan pengalaman mikro. Pada tingkat nasional, jasa modern dapat tampak membaik, tetapi rumah tangga tertentu mungkin tetap menghadapi biaya tinggi, ketidakpastian pekerjaan, atau kualitas layanan yang rendah. Ekonomi politik memeriksa jarak tersebut melalui distribusi pendapatan, kepemilikan aset, akses terhadap jaringan, dan posisi tawar. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya diarahkan untuk memperbesar kue ekonomi, tetapi juga untuk memperbaiki aturan pembagian kesempatan sehingga lebih banyak orang mampu ikut menghasilkan nilai tambah.

Dimensi institusional menjadi penting karena pertanian tidak berkembang di ruang hampa. Aturan formal, praktik birokrasi, kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, dan mekanisme pengawasan membentuk perilaku aktor. Ketika pelaku usaha percaya bahwa aturan konsisten dan sengketa dapat diselesaikan secara adil, horizon investasi menjadi lebih panjang. Ketika warga percaya bahwa program publik dikelola transparan, kepatuhan meningkat. Sebaliknya, ketidakpastian regulasi dan persepsi ketidakadilan mendorong perilaku defensif: investasi ditunda, tabungan dipindahkan, atau energi dialihkan untuk mencari akses khusus.

Persoalan teknologi juga menunjukkan adanya trade-off waktu. Kebijakan jangka pendek sering dibutuhkan untuk menahan guncangan, tetapi perlindungan yang terlalu lama dapat mengunci struktur lama. Subsidi, proteksi, atau insentif investasi perlu memiliki tujuan, indikator keberhasilan, dan mekanisme penghentian yang jelas. Jika tidak, kebijakan dapat berubah menjadi hak istimewa yang sulit dicabut. Ekonomi politik membantu menjelaskan mengapa kebijakan semacam itu bertahan: penerima manfaat biasanya terorganisasi, sedangkan biaya tersebar kepada banyak pembayar pajak dan konsumen.

Dari sisi pembangunan manusia, pelatihan harus ditempatkan sebagai tujuan sekaligus sarana. Individu yang sehat, terdidik, aman, dan memiliki keterampilan dapat berpartisipasi lebih produktif dalam ekonomi. Namun investasi manusia tidak cukup jika struktur ekonomi tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai. Karena itu, pendidikan, industri, pasar kerja, dan kebijakan inovasi perlu dirancang sebagai satu ekosistem. Ketidakesesuaian di antara keempatnya menghasilkan lulusan tanpa pekerjaan yang tepat, perusahaan yang kekurangan keterampilan, dan produktivitas yang stagnan.

Indonesia juga perlu membedakan antara pemerataan hasil dan pemerataan kesempatan. Pemerataan hasil tertentu diperlukan untuk menjaga standar hidup minimum, tetapi pembangunan jangka panjang menuntut perluasan kesempatan melalui pendidikan bermutu, akses kesehatan, konektivitas, pembiayaan, dan kepastian hukum. Kesempatan yang lebih merata memperbesar basis talenta nasional dan mengurangi ketergantungan pada jaringan sosial tertentu. Dalam ekonomi modern, kemampuan menemukan dan memanfaatkan talenta dari seluruh lapisan masyarakat merupakan sumber keunggulan yang sama pentingnya dengan modal fisik.

Pada tingkat kebijakan, koordinasi menjadi faktor penentu. Program yang berkaitan dengan manufaktur, jasa modern, pertanian, teknologi, dan pelatihan hampir selalu melintasi batas kementerian dan pemerintahan daerah. Tanpa arsitektur koordinasi, setiap lembaga dapat mencapai target sektoral tetapi hasil keseluruhan tetap lemah. Pendekatan whole-of-government memerlukan data bersama, definisi indikator yang konsisten, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme eskalasi masalah. Koordinasi bukan berarti sentralisasi semua keputusan; banyak keputusan justru lebih efektif ketika kewenangan didelegasikan kepada unit yang paling dekat dengan informasi.

Dalam perspektif ekonomi politik, reformasi berkelanjutan membutuhkan koalisi sosial. Kebijakan yang hanya dimiliki oleh satu kementerian atau satu periode pemerintahan rentan berubah. Sebaliknya, ketika dunia usaha, pekerja, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan warga memahami tujuan reformasi, biaya politik untuk membatalkan kebijakan yang baik menjadi lebih tinggi. Konsultasi publik karena itu bukan sekadar prosedur, tetapi instrumen membangun informasi dan legitimasi. Proses tersebut tetap membutuhkan kepemimpinan agar konsultasi tidak berubah menjadi veto tanpa akhir.

Pengukuran hasil harus bergeser dari input menuju outcome. Besarnya anggaran, jumlah pelatihan, jumlah izin yang diterbitkan, atau panjang infrastruktur hanya mempunyai arti jika meningkatkan produktivitas, pendapatan, akses, dan kualitas hidup. Pemerintah perlu membangun budaya evaluasi yang menerima kemungkinan bahwa program dapat gagal atau perlu diubah. Kegagalan yang terdeteksi melalui evaluasi bukan tanda kelemahan; yang lebih berbahaya adalah mempertahankan program yang tidak efektif karena alasan politik atau reputasi.

Pada akhirnya, tema ini kembali pada tiga kata kunci artikel: pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan. Pertumbuhan menyediakan sumber daya, stabilitas menciptakan ruang untuk keputusan jangka panjang, dan kesejahteraan memberi tujuan normatif. Ketiganya harus diikat oleh institusi yang kredibel dan kemampuan belajar. Indonesia 2026 memiliki modal penting berupa skala pasar, demografi, sumber daya, posisi geopolitik, dan pengalaman menghadapi krisis. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi produktivitas yang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih luas melalui pilihan kebijakan yang konsisten melampaui siklus politik.

5. Daerah, Kota, dan Pusat Pertumbuhan Baru

Pertumbuhan Indonesia akan lebih kokoh apabila pusat-pusat produksi, inovasi, dan pekerjaan berkualitas berkembang di luar konsentrasi tradisional. Dalam praktik pembangunan, hubungan ini sering tidak langsung. Perubahan pada kota menengah dapat memperbaiki indikator ekonomi, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sangat bergantung pada logistik dan universitas. Karena itu, analisis harus bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan' menuju 'bagaimana pertumbuhan

dihasilkan, siapa yang berpartisipasi, dan apa yang diwariskan kepada periode berikutnya'. Perspektif semacam ini penting bagi Indonesia karena ukuran ekonomi yang besar membuat kebijakan nasional selalu bertemu dengan variasi daerah, struktur sosial, dan kapasitas institusi yang sangat beragam.

Salah satu persoalan utama adalah adanya jarak antara indikator agregat dan pengalaman mikro. Pada tingkat nasional, logistik dapat tampak membaik, tetapi rumah tangga tertentu mungkin tetap menghadapi biaya tinggi, ketidakpastian pekerjaan, atau kualitas layanan yang rendah. Ekonomi politik memeriksa jarak tersebut melalui distribusi pendapatan, kepemilikan aset, akses terhadap jaringan, dan posisi tawar. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya diarahkan untuk memperbesar kue ekonomi, tetapi juga untuk memperbaiki aturan pembagian kesempatan sehingga lebih banyak orang mampu ikut menghasilkan nilai tambah.

Dimensi institusional menjadi penting karena universitas tidak berkembang di ruang hampa. Aturan formal, praktik birokrasi, kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, dan mekanisme pengawasan membentuk perilaku aktor. Ketika pelaku usaha percaya bahwa aturan konsisten dan sengketa dapat diselesaikan secara adil, horizon investasi menjadi lebih panjang. Ketika warga percaya bahwa program publik dikelola transparan, kepatuhan meningkat. Sebaliknya, ketidakpastian regulasi dan persepsi ketidakadilan mendorong perilaku defensif: investasi ditunda, tabungan dipindahkan, atau energi dialihkan untuk mencari akses khusus.

Persoalan industri lokal juga menunjukkan adanya trade-off waktu. Kebijakan jangka pendek sering dibutuhkan untuk menahan guncangan, tetapi perlindungan yang terlalu lama dapat mengunci struktur lama. Subsidi, proteksi, atau insentif investasi perlu memiliki tujuan, indikator keberhasilan, dan mekanisme penghentian yang jelas. Jika tidak, kebijakan dapat berubah menjadi hak istimewa yang sulit dicabut. Ekonomi politik membantu menjelaskan mengapa kebijakan semacam itu bertahan: penerima manfaat biasanya terorganisasi, sedangkan biaya tersebar kepada banyak pembayar pajak dan konsumen.

Dari sisi pembangunan manusia, konektivitas harus ditempatkan sebagai tujuan sekaligus sarana. Individu yang sehat, terdidik, aman, dan memiliki keterampilan dapat berpartisipasi lebih produktif dalam ekonomi. Namun investasi manusia tidak cukup jika struktur ekonomi tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai. Karena itu, pendidikan, industri, pasar kerja, dan kebijakan inovasi perlu dirancang sebagai satu ekosistem. Ketidakesesuaian di antara keempatnya menghasilkan lulusan tanpa pekerjaan yang tepat, perusahaan yang kekurangan keterampilan, dan produktivitas yang stagnan.

Indonesia juga perlu membedakan antara pemerataan hasil dan pemerataan kesempatan. Pemerataan hasil tertentu diperlukan untuk menjaga standar hidup minimum, tetapi pembangunan jangka panjang menuntut perluasan kesempatan melalui pendidikan bermutu, akses kesehatan, konektivitas, pembiayaan, dan kepastian hukum. Kesempatan yang lebih merata memperbesar basis talenta nasional dan mengurangi ketergantungan pada jaringan sosial tertentu. Dalam ekonomi modern, kemampuan menemukan dan memanfaatkan talenta dari seluruh lapisan masyarakat merupakan sumber keunggulan yang sama pentingnya dengan modal fisik.

Pada tingkat kebijakan, koordinasi menjadi faktor penentu. Program yang berkaitan dengan kota menengah, logistik, universitas, industri lokal, dan konektivitas hampir selalu melintasi batas kementerian dan pemerintahan daerah. Tanpa arsitektur koordinasi, setiap lembaga dapat mencapai

target sektoral tetapi hasil keseluruhan tetap lemah. Pendekatan whole-of-government memerlukan data bersama, definisi indikator yang konsisten, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme eskalasi masalah. Koordinasi bukan berarti sentralisasi semua keputusan; banyak keputusan justru lebih efektif ketika kewenangan didelegasikan kepada unit yang paling dekat dengan informasi.

Dalam perspektif ekonomi politik, reformasi berkelanjutan membutuhkan koalisi sosial. Kebijakan yang hanya dimiliki oleh satu kementerian atau satu periode pemerintahan rentan berubah. Sebaliknya, ketika dunia usaha, pekerja, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan warga memahami tujuan reformasi, biaya politik untuk membatalkan kebijakan yang baik menjadi lebih tinggi. Konsultasi publik karena itu bukan sekadar prosedur, tetapi instrumen membangun informasi dan legitimasi. Proses tersebut tetap membutuhkan kepemimpinan agar konsultasi tidak berubah menjadi veto tanpa akhir.

Pengukuran hasil harus bergeser dari input menuju outcome. Besarnya anggaran, jumlah pelatihan, jumlah izin yang diterbitkan, atau panjang infrastruktur hanya mempunyai arti jika meningkatkan produktivitas, pendapatan, akses, dan kualitas hidup. Pemerintah perlu membangun budaya evaluasi yang menerima kemungkinan bahwa program dapat gagal atau perlu diubah. Kegagalan yang terdeteksi melalui evaluasi bukan tanda kelemahan; yang lebih berbahaya adalah mempertahankan program yang tidak efektif karena alasan politik atau reputasi.

Pada akhirnya, tema ini kembali pada tiga kata kunci artikel: pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan. Pertumbuhan menyediakan sumber daya, stabilitas menciptakan ruang untuk keputusan jangka panjang, dan kesejahteraan memberi tujuan normatif. Ketiganya harus diikat oleh institusi yang kredibel dan kemampuan belajar. Indonesia 2026 memiliki modal penting berupa skala pasar, demografi, sumber daya, posisi geopolitik, dan pengalaman menghadapi krisis. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi produktivitas yang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih luas melalui pilihan kebijakan yang konsisten melampaui siklus politik.

6. Ekonomi Politik Pangan dan Petani Kecil

Kebijakan pangan yang berkelanjutan harus menjaga keterjangkauan bagi konsumen sekaligus memberikan insentif yang layak bagi produsen. Dalam praktik pembangunan, hubungan ini sering tidak langsung. Perubahan pada harga dapat memperbaiki indikator ekonomi, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sangat bergantung pada produktivitas petani dan irigasi. Karena itu, analisis harus bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan' menuju 'bagaimana pertumbuhan dihasilkan, siapa yang berpartisipasi, dan apa yang diwariskan kepada periode berikutnya'. Perspektif semacam ini penting bagi Indonesia karena ukuran ekonomi yang besar membuat kebijakan nasional selalu bertemu dengan variasi daerah, struktur sosial, dan kapasitas institusi yang sangat beragam.

Salah satu persoalan utama adalah adanya jarak antara indikator agregat dan pengalaman mikro. Pada tingkat nasional, produktivitas petani dapat tampak membaik, tetapi rumah tangga tertentu mungkin tetap menghadapi biaya tinggi, ketidakpastian pekerjaan, atau kualitas layanan yang rendah. Ekonomi politik memeriksa jarak tersebut melalui distribusi pendapatan, kepemilikan aset, akses terhadap jaringan, dan posisi tawar. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya diarahkan untuk memperbesar kue ekonomi, tetapi juga untuk memperbaiki aturan pembagian kesempatan sehingga lebih banyak orang mampu ikut menghasilkan nilai tambah.

Dimensi institusional menjadi penting karena irigasi tidak berkembang di ruang hampa. Aturan formal, praktik birokrasi, kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, dan mekanisme pengawasan membentuk perilaku aktor. Ketika pelaku usaha percaya bahwa aturan konsisten dan sengketa dapat diselesaikan secara adil, horizon investasi menjadi lebih panjang. Ketika warga percaya bahwa program publik dikelola transparan, kepatuhan meningkat. Sebaliknya, ketidakpastian regulasi dan persepsi ketidakadilan mendorong perilaku defensif: investasi ditunda, tabungan dipindahkan, atau energi dialihkan untuk mencari akses khusus.

Persoalan distribusi juga menunjukkan adanya trade-off waktu. Kebijakan jangka pendek sering dibutuhkan untuk menahan guncangan, tetapi perlindungan yang terlalu lama dapat mengunci struktur lama. Subsidi, proteksi, atau insentif investasi perlu memiliki tujuan, indikator keberhasilan, dan mekanisme penghentian yang jelas. Jika tidak, kebijakan dapat berubah menjadi hak istimewa yang sulit dicabut. Ekonomi politik membantu menjelaskan mengapa kebijakan semacam itu bertahan: penerima manfaat biasanya terorganisasi, sedangkan biaya tersebar kepada banyak pembayar pajak dan konsumen.

Dari sisi pembangunan manusia, cadangan pangan harus ditempatkan sebagai tujuan sekaligus sarana. Individu yang sehat, terdidik, aman, dan memiliki keterampilan dapat berpartisipasi lebih produktif dalam ekonomi. Namun investasi manusia tidak cukup jika struktur ekonomi tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai. Karena itu, pendidikan, industri, pasar kerja, dan kebijakan inovasi perlu dirancang sebagai satu ekosistem. Ketidakesesuaian di antara keempatnya menghasilkan lulusan tanpa pekerjaan yang tepat, perusahaan yang kekurangan keterampilan, dan produktivitas yang stagnan.

Indonesia juga perlu membedakan antara pemerataan hasil dan pemerataan kesempatan. Pemerataan hasil tertentu diperlukan untuk menjaga standar hidup minimum, tetapi pembangunan jangka panjang menuntut perluasan kesempatan melalui pendidikan bermutu, akses kesehatan, konektivitas, pembiayaan, dan kepastian hukum. Kesempatan yang lebih merata memperbesar basis talenta nasional dan mengurangi ketergantungan pada jaringan sosial tertentu. Dalam ekonomi modern, kemampuan menemukan dan memanfaatkan talenta dari seluruh lapisan masyarakat merupakan sumber keunggulan yang sama pentingnya dengan modal fisik.

Pada tingkat kebijakan, koordinasi menjadi faktor penentu. Program yang berkaitan dengan harga, produktivitas petani, irigasi, distribusi, dan cadangan pangan hampir selalu melintasi batas kementerian dan pemerintahan daerah. Tanpa arsitektur koordinasi, setiap lembaga dapat mencapai target sektoral tetapi hasil keseluruhan tetap lemah. Pendekatan whole-of-government memerlukan data bersama, definisi indikator yang konsisten, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme eskalasi masalah. Koordinasi bukan berarti sentralisasi semua keputusan; banyak keputusan justru lebih efektif ketika kewenangan didelegasikan kepada unit yang paling dekat dengan informasi.

Dalam perspektif ekonomi politik, reformasi berkelanjutan membutuhkan koalisi sosial. Kebijakan yang hanya dimiliki oleh satu kementerian atau satu periode pemerintahan rentan berubah. Sebaliknya, ketika dunia usaha, pekerja, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan warga memahami tujuan reformasi, biaya politik untuk membatalkan kebijakan yang baik menjadi lebih tinggi. Konsultasi publik karena itu bukan sekadar prosedur, tetapi instrumen membangun informasi dan legitimasi.

Proses tersebut tetap membutuhkan kepemimpinan agar konsultasi tidak berubah menjadi veto tanpa akhir.

Pengukuran hasil harus bergeser dari input menuju outcome. Besarnya anggaran, jumlah pelatihan, jumlah izin yang diterbitkan, atau panjang infrastruktur hanya mempunyai arti jika meningkatkan produktivitas, pendapatan, akses, dan kualitas hidup. Pemerintah perlu membangun budaya evaluasi yang menerima kemungkinan bahwa program dapat gagal atau perlu diubah. Kegagalan yang terdeteksi melalui evaluasi bukan tanda kelemahan; yang lebih berbahaya adalah mempertahankan program yang tidak efektif karena alasan politik atau reputasi.

Pada akhirnya, tema ini kembali pada tiga kata kunci artikel: pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan. Pertumbuhan menyediakan sumber daya, stabilitas menciptakan ruang untuk keputusan jangka panjang, dan kesejahteraan memberi tujuan normatif. Ketiganya harus diikat oleh institusi yang kredibel dan kemampuan belajar. Indonesia 2026 memiliki modal penting berupa skala pasar, demografi, sumber daya, posisi geopolitik, dan pengalaman menghadapi krisis. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi produktivitas yang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih luas melalui pilihan kebijakan yang konsisten melampaui siklus politik.

7. Digitalisasi, AI, dan Distribusi Produktivitas

AI dapat meningkatkan produktivitas, tetapi manfaatnya tidak otomatis tersebar secara merata karena kemampuan mengadopsi teknologi berbeda antarperusahaan dan pekerja. Dalam praktik pembangunan, hubungan ini sering tidak langsung. Perubahan pada data dapat memperbaiki indikator ekonomi, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sangat bergantung pada komputasi dan keterampilan. Karena itu, analisis harus bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan' menuju 'bagaimana pertumbuhan dihasilkan, siapa yang berpartisipasi, dan apa yang diwariskan kepada periode berikutnya'. Perspektif semacam ini penting bagi Indonesia karena ukuran ekonomi yang besar membuat kebijakan nasional selalu bertemu dengan variasi daerah, struktur sosial, dan kapasitas institusi yang sangat beragam.

Salah satu persoalan utama adalah adanya jarak antara indikator agregat dan pengalaman mikro. Pada tingkat nasional, komputasi dapat tampak membaik, tetapi rumah tangga tertentu mungkin tetap menghadapi biaya tinggi, ketidakpastian pekerjaan, atau kualitas layanan yang rendah. Ekonomi politik memeriksa jarak tersebut melalui distribusi pendapatan, kepemilikan aset, akses terhadap jaringan, dan posisi tawar. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya diarahkan untuk memperbesar kue ekonomi, tetapi juga untuk memperbaiki aturan pembagian kesempatan sehingga lebih banyak orang mampu ikut menghasilkan nilai tambah.

Dimensi institusional menjadi penting karena keterampilan tidak berkembang di ruang hampa. Aturan formal, praktik birokrasi, kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, dan mekanisme pengawasan membentuk perilaku aktor. Ketika pelaku usaha percaya bahwa aturan konsisten dan sengketa dapat diselesaikan secara adil, horizon investasi menjadi lebih panjang. Ketika warga percaya bahwa program publik dikelola transparan, kepatuhan meningkat. Sebaliknya, ketidakpastian regulasi dan persepsi ketidakadilan mendorong perilaku defensif: investasi ditunda, tabungan dipindahkan, atau energi dialihkan untuk mencari akses khusus.

Persoalan UMKM juga menunjukkan adanya trade-off waktu. Kebijakan jangka pendek sering dibutuhkan untuk menahan guncangan, tetapi perlindungan yang terlalu lama dapat mengunci struktur lama. Subsidi, proteksi, atau insentif investasi perlu memiliki tujuan, indikator keberhasilan, dan mekanisme penghentian yang jelas. Jika tidak, kebijakan dapat berubah menjadi hak istimewa yang sulit dicabut. Ekonomi politik membantu menjelaskan mengapa kebijakan semacam itu bertahan: penerima manfaat biasanya terorganisasi, sedangkan biaya tersebar kepada banyak pembayar pajak dan konsumen.

Dari sisi pembangunan manusia, regulasi harus ditempatkan sebagai tujuan sekaligus sarana. Individu yang sehat, terdidik, aman, dan memiliki keterampilan dapat berpartisipasi lebih produktif dalam ekonomi. Namun investasi manusia tidak cukup jika struktur ekonomi tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai. Karena itu, pendidikan, industri, pasar kerja, dan kebijakan inovasi perlu dirancang sebagai satu ekosistem. Ketidaksesuaian di antara keempatnya menghasilkan lulusan tanpa pekerjaan yang tepat, perusahaan yang kekurangan keterampilan, dan produktivitas yang stagnan.

Indonesia juga perlu membedakan antara pemerataan hasil dan pemerataan kesempatan. Pemerataan hasil tertentu diperlukan untuk menjaga standar hidup minimum, tetapi pembangunan jangka panjang menuntut perluasan kesempatan melalui pendidikan bermutu, akses kesehatan, konektivitas, pembiayaan, dan kepastian hukum. Kesempatan yang lebih merata memperbesar basis talenta nasional dan mengurangi ketergantungan pada jaringan sosial tertentu. Dalam ekonomi modern, kemampuan menemukan dan memanfaatkan talenta dari seluruh lapisan masyarakat merupakan sumber keunggulan yang sama pentingnya dengan modal fisik.

Pada tingkat kebijakan, koordinasi menjadi faktor penentu. Program yang berkaitan dengan data, komputasi, keterampilan, UMKM, dan regulasi hampir selalu melintasi batas kementerian dan pemerintahan daerah. Tanpa arsitektur koordinasi, setiap lembaga dapat mencapai target sektoral tetapi hasil keseluruhan tetap lemah. Pendekatan whole-of-government memerlukan data bersama, definisi indikator yang konsisten, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme eskalasi masalah. Koordinasi bukan berarti sentralisasi semua keputusan; banyak keputusan justru lebih efektif ketika kewenangan didelegasikan kepada unit yang paling dekat dengan informasi.

Dalam perspektif ekonomi politik, reformasi berkelanjutan membutuhkan koalisi sosial. Kebijakan yang hanya dimiliki oleh satu kementerian atau satu periode pemerintahan rentan berubah. Sebaliknya, ketika dunia usaha, pekerja, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan warga memahami tujuan reformasi, biaya politik untuk membatalkan kebijakan yang baik menjadi lebih tinggi. Konsultasi publik karena itu bukan sekadar prosedur, tetapi instrumen membangun informasi dan legitimasi. Proses tersebut tetap membutuhkan kepemimpinan agar konsultasi tidak berubah menjadi veto tanpa akhir.

Pengukuran hasil harus bergeser dari input menuju outcome. Besarnya anggaran, jumlah pelatihan, jumlah izin yang diterbitkan, atau panjang infrastruktur hanya mempunyai arti jika meningkatkan produktivitas, pendapatan, akses, dan kualitas hidup. Pemerintah perlu membangun budaya evaluasi yang menerima kemungkinan bahwa program dapat gagal atau perlu diubah. Kegagalan yang terdeteksi melalui evaluasi bukan tanda kelemahan; yang lebih berbahaya adalah mempertahankan program yang tidak efektif karena alasan politik atau reputasi.

Pada akhirnya, tema ini kembali pada tiga kata kunci artikel: pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan. Pertumbuhan menyediakan sumber daya, stabilitas menciptakan ruang untuk keputusan jangka panjang, dan kesejahteraan memberi tujuan normatif. Ketiganya harus diikat oleh institusi yang kredibel dan kemampuan belajar. Indonesia 2026 memiliki modal penting berupa skala pasar, demografi, sumber daya, posisi geopolitik, dan pengalaman menghadapi krisis. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi produktivitas yang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih luas melalui pilihan kebijakan yang konsisten melampaui siklus politik.

8. Transisi Hijau sebagai Agenda Ekonomi Politik

Transisi menuju ekonomi rendah karbon adalah perubahan struktur investasi dan pekerjaan, bukan hanya agenda lingkungan. Dalam praktik pembangunan, hubungan ini sering tidak langsung. Perubahan pada energi dapat memperbaiki indikator ekonomi, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sangat bergantung pada industri dan pekerja terdampak. Karena itu, analisis harus bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan' menuju 'bagaimana pertumbuhan dihasilkan, siapa yang berpartisipasi, dan apa yang diwariskan kepada periode berikutnya'. Perspektif semacam ini penting bagi Indonesia karena ukuran ekonomi yang besar membuat kebijakan nasional selalu bertemu dengan variasi daerah, struktur sosial, dan kapasitas institusi yang sangat beragam.

Salah satu persoalan utama adalah adanya jarak antara indikator agregat dan pengalaman mikro. Pada tingkat nasional, industri dapat tampak membaik, tetapi rumah tangga tertentu mungkin tetap menghadapi biaya tinggi, ketidakpastian pekerjaan, atau kualitas layanan yang rendah. Ekonomi politik memeriksa jarak tersebut melalui distribusi pendapatan, kepemilikan aset, akses terhadap jaringan, dan posisi tawar. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya diarahkan untuk memperbesar kue ekonomi, tetapi juga untuk memperbaiki aturan pembagian kesempatan sehingga lebih banyak orang mampu ikut menghasilkan nilai tambah.

Dimensi institusional menjadi penting karena pekerja terdampak tidak berkembang di ruang hampa. Aturan formal, praktik birokrasi, kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, dan mekanisme pengawasan membentuk perilaku aktor. Ketika pelaku usaha percaya bahwa aturan konsisten dan sengketa dapat diselesaikan secara adil, horizon investasi menjadi lebih panjang. Ketika warga percaya bahwa program publik dikelola transparan, kepatuhan meningkat. Sebaliknya, ketidakpastian regulasi dan persepsi ketidakadilan mendorong perilaku defensif: investasi ditunda, tabungan dipindahkan, atau energi dialihkan untuk mencari akses khusus.

Persoalan pembiayaan hijau juga menunjukkan adanya trade-off waktu. Kebijakan jangka pendek sering dibutuhkan untuk menahan guncangan, tetapi perlindungan yang terlalu lama dapat mengunci struktur lama. Subsidi, proteksi, atau insentif investasi perlu memiliki tujuan, indikator keberhasilan, dan mekanisme penghentian yang jelas. Jika tidak, kebijakan dapat berubah menjadi hak istimewa yang sulit dicabut. Ekonomi politik membantu menjelaskan mengapa kebijakan semacam itu bertahan: penerima manfaat biasanya terorganisasi, sedangkan biaya tersebar kepada banyak pembayar pajak dan konsumen.

Dari sisi pembangunan manusia, keadilan antargenerasi harus ditempatkan sebagai tujuan sekaligus sarana. Individu yang sehat, terdidik, aman, dan memiliki keterampilan dapat berpartisipasi lebih produktif dalam ekonomi. Namun investasi manusia tidak cukup jika struktur ekonomi tidak

menyediakan pekerjaan yang sesuai. Karena itu, pendidikan, industri, pasar kerja, dan kebijakan inovasi perlu dirancang sebagai satu ekosistem. Ketidaksesuaian di antara keempatnya menghasilkan lulusan tanpa pekerjaan yang tepat, perusahaan yang kekurangan keterampilan, dan produktivitas yang stagnan.

Indonesia juga perlu membedakan antara pemerataan hasil dan pemerataan kesempatan. Pemerataan hasil tertentu diperlukan untuk menjaga standar hidup minimum, tetapi pembangunan jangka panjang menuntut perluasan kesempatan melalui pendidikan bermutu, akses kesehatan, konektivitas, pembiayaan, dan kepastian hukum. Kesempatan yang lebih merata memperbesar basis talenta nasional dan mengurangi ketergantungan pada jaringan sosial tertentu. Dalam ekonomi modern, kemampuan menemukan dan memanfaatkan talenta dari seluruh lapisan masyarakat merupakan sumber keunggulan yang sama pentingnya dengan modal fisik.

Pada tingkat kebijakan, koordinasi menjadi faktor penentu. Program yang berkaitan dengan energi, industri, pekerja terdampak, pembiayaan hijau, dan keadilan antargenerasi hampir selalu melintasi batas kementerian dan pemerintahan daerah. Tanpa arsitektur koordinasi, setiap lembaga dapat mencapai target sektoral tetapi hasil keseluruhan tetap lemah. Pendekatan whole-of-government memerlukan data bersama, definisi indikator yang konsisten, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme eskalasi masalah. Koordinasi bukan berarti sentralisasi semua keputusan; banyak keputusan justru lebih efektif ketika kewenangan didelegasikan kepada unit yang paling dekat dengan informasi.

Dalam perspektif ekonomi politik, reformasi berkelanjutan membutuhkan koalisi sosial. Kebijakan yang hanya dimiliki oleh satu kementerian atau satu periode pemerintahan rentan berubah. Sebaliknya, ketika dunia usaha, pekerja, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan warga memahami tujuan reformasi, biaya politik untuk membatalkan kebijakan yang baik menjadi lebih tinggi. Konsultasi publik karena itu bukan sekadar prosedur, tetapi instrumen membangun informasi dan legitimasi. Proses tersebut tetap membutuhkan kepemimpinan agar konsultasi tidak berubah menjadi veto tanpa akhir.

Pengukuran hasil harus bergeser dari input menuju outcome. Besarnya anggaran, jumlah pelatihan, jumlah izin yang diterbitkan, atau panjang infrastruktur hanya mempunyai arti jika meningkatkan produktivitas, pendapatan, akses, dan kualitas hidup. Pemerintah perlu membangun budaya evaluasi yang menerima kemungkinan bahwa program dapat gagal atau perlu diubah. Kegagalan yang terdeteksi melalui evaluasi bukan tanda kelemahan; yang lebih berbahaya adalah mempertahankan program yang tidak efektif karena alasan politik atau reputasi.

Pada akhirnya, tema ini kembali pada tiga kata kunci artikel: pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan. Pertumbuhan menyediakan sumber daya, stabilitas menciptakan ruang untuk keputusan jangka panjang, dan kesejahteraan memberi tujuan normatif. Ketiganya harus diikat oleh institusi yang kredibel dan kemampuan belajar. Indonesia 2026 memiliki modal penting berupa skala pasar, demografi, sumber daya, posisi geopolitik, dan pengalaman menghadapi krisis. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi produktivitas yang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih luas melalui pilihan kebijakan yang konsisten melampaui siklus politik.

9. Pemerintahan Digital dan Kepercayaan

Digitalisasi administrasi publik dapat menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan transparansi apabila didukung interoperabilitas, keamanan, dan perlindungan data. Dalam praktik pembangunan, hubungan ini sering tidak langsung. Perubahan pada identitas digital dapat memperbaiki indikator ekonomi, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sangat bergantung pada layanan terpadu dan keamanan siber. Karena itu, analisis harus bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan' menuju 'bagaimana pertumbuhan dihasilkan, siapa yang berpartisipasi, dan apa yang diwariskan kepada periode berikutnya'. Perspektif semacam ini penting bagi Indonesia karena ukuran ekonomi yang besar membuat kebijakan nasional selalu bertemu dengan variasi daerah, struktur sosial, dan kapasitas institusi yang sangat beragam.

Salah satu persoalan utama adalah adanya jarak antara indikator agregat dan pengalaman mikro. Pada tingkat nasional, layanan terpadu dapat tampak membaik, tetapi rumah tangga tertentu mungkin tetap menghadapi biaya tinggi, ketidakpastian pekerjaan, atau kualitas layanan yang rendah. Ekonomi politik memeriksa jarak tersebut melalui distribusi pendapatan, kepemilikan aset, akses terhadap jaringan, dan posisi tawar. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya diarahkan untuk memperbesar kue ekonomi, tetapi juga untuk memperbaiki aturan pembagian kesempatan sehingga lebih banyak orang mampu ikut menghasilkan nilai tambah.

Dimensi institusional menjadi penting karena keamanan siber tidak berkembang di ruang hampa. Aturan formal, praktik birokrasi, kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, dan mekanisme pengawasan membentuk perilaku aktor. Ketika pelaku usaha percaya bahwa aturan konsisten dan sengketa dapat diselesaikan secara adil, horizon investasi menjadi lebih panjang. Ketika warga percaya bahwa program publik dikelola transparan, kepatuhan meningkat. Sebaliknya, ketidakpastian regulasi dan persepsi ketidakadilan mendorong perilaku defensif: investasi ditunda, tabungan dipindahkan, atau energi dialihkan untuk mencari akses khusus.

Persoalan open data juga menunjukkan adanya trade-off waktu. Kebijakan jangka pendek sering dibutuhkan untuk menahan guncangan, tetapi perlindungan yang terlalu lama dapat mengunci struktur lama. Subsidi, proteksi, atau insentif investasi perlu memiliki tujuan, indikator keberhasilan, dan mekanisme penghentian yang jelas. Jika tidak, kebijakan dapat berubah menjadi hak istimewa yang sulit dicabut. Ekonomi politik membantu menjelaskan mengapa kebijakan semacam itu bertahan: penerima manfaat biasanya terorganisasi, sedangkan biaya tersebar kepada banyak pembayar pajak dan konsumen.

Dari sisi pembangunan manusia, akuntabilitas harus ditempatkan sebagai tujuan sekaligus sarana. Individu yang sehat, terdidik, aman, dan memiliki keterampilan dapat berpartisipasi lebih produktif dalam ekonomi. Namun investasi manusia tidak cukup jika struktur ekonomi tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai. Karena itu, pendidikan, industri, pasar kerja, dan kebijakan inovasi perlu dirancang sebagai satu ekosistem. Ketidakesesuaian di antara keempatnya menghasilkan lulusan tanpa pekerjaan yang tepat, perusahaan yang kekurangan keterampilan, dan produktivitas yang stagnan.

Indonesia juga perlu membedakan antara pemerataan hasil dan pemerataan kesempatan. Pemerataan hasil tertentu diperlukan untuk menjaga standar hidup minimum, tetapi pembangunan jangka panjang menuntut perluasan kesempatan melalui pendidikan bermutu, akses kesehatan, konektivitas,

pembiayaan, dan kepastian hukum. Kesempatan yang lebih merata memperbesar basis talenta nasional dan mengurangi ketergantungan pada jaringan sosial tertentu. Dalam ekonomi modern, kemampuan menemukan dan memanfaatkan talenta dari seluruh lapisan masyarakat merupakan sumber keunggulan yang sama pentingnya dengan modal fisik.

Pada tingkat kebijakan, koordinasi menjadi faktor penentu. Program yang berkaitan dengan identitas digital, layanan terpadu, keamanan siber, open data, dan akuntabilitas hampir selalu melintasi batas kementerian dan pemerintahan daerah. Tanpa arsitektur koordinasi, setiap lembaga dapat mencapai target sektoral tetapi hasil keseluruhan tetap lemah. Pendekatan whole-of-government memerlukan data bersama, definisi indikator yang konsisten, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme eskalasi masalah. Koordinasi bukan berarti sentralisasi semua keputusan; banyak keputusan justru lebih efektif ketika kewenangan didelegasikan kepada unit yang paling dekat dengan informasi.

Dalam perspektif ekonomi politik, reformasi berkelanjutan membutuhkan koalisi sosial. Kebijakan yang hanya dimiliki oleh satu kementerian atau satu periode pemerintahan rentan berubah. Sebaliknya, ketika dunia usaha, pekerja, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan warga memahami tujuan reformasi, biaya politik untuk membatalkan kebijakan yang baik menjadi lebih tinggi. Konsultasi publik karena itu bukan sekadar prosedur, tetapi instrumen membangun informasi dan legitimasi. Proses tersebut tetap membutuhkan kepemimpinan agar konsultasi tidak berubah menjadi veto tanpa akhir.

Pengukuran hasil harus bergeser dari input menuju outcome. Besarnya anggaran, jumlah pelatihan, jumlah izin yang diterbitkan, atau panjang infrastruktur hanya mempunyai arti jika meningkatkan produktivitas, pendapatan, akses, dan kualitas hidup. Pemerintah perlu membangun budaya evaluasi yang menerima kemungkinan bahwa program dapat gagal atau perlu diubah. Kegagalan yang terdeteksi melalui evaluasi bukan tanda kelemahan; yang lebih berbahaya adalah mempertahankan program yang tidak efektif karena alasan politik atau reputasi.

Pada akhirnya, tema ini kembali pada tiga kata kunci artikel: pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan. Pertumbuhan menyediakan sumber daya, stabilitas menciptakan ruang untuk keputusan jangka panjang, dan kesejahteraan memberi tujuan normatif. Ketiganya harus diikat oleh institusi yang kredibel dan kemampuan belajar. Indonesia 2026 memiliki modal penting berupa skala pasar, demografi, sumber daya, posisi geopolitik, dan pengalaman menghadapi krisis. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi produktivitas yang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih luas melalui pilihan kebijakan yang konsisten melampaui siklus politik.

10. Kebijakan Berbasis Bukti dan Politik

Kebijakan berbasis bukti tidak menghilangkan politik, tetapi membuat pilihan politik lebih transparan karena asumsi, biaya, dan hasil dapat diuji. Dalam praktik pembangunan, hubungan ini sering tidak langsung. Perubahan pada data resmi dapat memperbaiki indikator ekonomi, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sangat bergantung pada evaluasi dampak dan eksperimen kebijakan. Karena itu, analisis harus bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan' menuju 'bagaimana pertumbuhan dihasilkan, siapa yang berpartisipasi, dan apa yang diwariskan kepada periode berikutnya'. Perspektif semacam ini penting bagi Indonesia karena ukuran ekonomi yang besar

membuat kebijakan nasional selalu bertemu dengan variasi daerah, struktur sosial, dan kapasitas institusi yang sangat beragam.

Salah satu persoalan utama adalah adanya jarak antara indikator agregat dan pengalaman mikro. Pada tingkat nasional, evaluasi dampak dapat tampak membaik, tetapi rumah tangga tertentu mungkin tetap menghadapi biaya tinggi, ketidakpastian pekerjaan, atau kualitas layanan yang rendah. Ekonomi politik memeriksa jarak tersebut melalui distribusi pendapatan, kepemilikan aset, akses terhadap jaringan, dan posisi tawar. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya diarahkan untuk memperbesar kue ekonomi, tetapi juga untuk memperbaiki aturan pembagian kesempatan sehingga lebih banyak orang mampu ikut menghasilkan nilai tambah.

Dimensi institusional menjadi penting karena eksperimen kebijakan tidak berkembang di ruang hampa. Aturan formal, praktik birokrasi, kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, dan mekanisme pengawasan membentuk perilaku aktor. Ketika pelaku usaha percaya bahwa aturan konsisten dan sengketa dapat diselesaikan secara adil, horizon investasi menjadi lebih panjang. Ketika warga percaya bahwa program publik dikelola transparan, kepatuhan meningkat. Sebaliknya, ketidakpastian regulasi dan persepsi ketidakadilan mendorong perilaku defensif: investasi ditunda, tabungan dipindahkan, atau energi dialihkan untuk mencari akses khusus.

Persoalan transparansi juga menunjukkan adanya trade-off waktu. Kebijakan jangka pendek sering dibutuhkan untuk menahan guncangan, tetapi perlindungan yang terlalu lama dapat mengunci struktur lama. Subsidi, proteksi, atau insentif investasi perlu memiliki tujuan, indikator keberhasilan, dan mekanisme penghentian yang jelas. Jika tidak, kebijakan dapat berubah menjadi hak istimewa yang sulit dicabut. Ekonomi politik membantu menjelaskan mengapa kebijakan semacam itu bertahan: penerima manfaat biasanya terorganisasi, sedangkan biaya tersebar kepada banyak pembayar pajak dan konsumen.

Dari sisi pembangunan manusia, learning government harus ditempatkan sebagai tujuan sekaligus sarana. Individu yang sehat, terdidik, aman, dan memiliki keterampilan dapat berpartisipasi lebih produktif dalam ekonomi. Namun investasi manusia tidak cukup jika struktur ekonomi tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai. Karena itu, pendidikan, industri, pasar kerja, dan kebijakan inovasi perlu dirancang sebagai satu ekosistem. Ketidaksiharian di antara keempatnya menghasilkan lulusan tanpa pekerjaan yang tepat, perusahaan yang kekurangan keterampilan, dan produktivitas yang stagnan.

Indonesia juga perlu membedakan antara pemerataan hasil dan pemerataan kesempatan. Pemerataan hasil tertentu diperlukan untuk menjaga standar hidup minimum, tetapi pembangunan jangka panjang menuntut perluasan kesempatan melalui pendidikan bermutu, akses kesehatan, konektivitas, pembiayaan, dan kepastian hukum. Kesempatan yang lebih merata memperbesar basis talenta nasional dan mengurangi ketergantungan pada jaringan sosial tertentu. Dalam ekonomi modern, kemampuan menemukan dan memanfaatkan talenta dari seluruh lapisan masyarakat merupakan sumber keunggulan yang sama pentingnya dengan modal fisik.

Pada tingkat kebijakan, koordinasi menjadi faktor penentu. Program yang berkaitan dengan data resmi, evaluasi dampak, eksperimen kebijakan, transparansi, dan learning government hampir selalu melintasi batas kementerian dan pemerintahan daerah. Tanpa arsitektur koordinasi, setiap lembaga dapat

mencapai target sektoral tetapi hasil keseluruhan tetap lemah. Pendekatan whole-of-government memerlukan data bersama, definisi indikator yang konsisten, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme eskalasi masalah. Koordinasi bukan berarti sentralisasi semua keputusan; banyak keputusan justru lebih efektif ketika kewenangan didelegasikan kepada unit yang paling dekat dengan informasi.

Dalam perspektif ekonomi politik, reformasi berkelanjutan membutuhkan koalisi sosial. Kebijakan yang hanya dimiliki oleh satu kementerian atau satu periode pemerintahan rentan berubah. Sebaliknya, ketika dunia usaha, pekerja, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan warga memahami tujuan reformasi, biaya politik untuk membatalkan kebijakan yang baik menjadi lebih tinggi. Konsultasi publik karena itu bukan sekadar prosedur, tetapi instrumen membangun informasi dan legitimasi. Proses tersebut tetap membutuhkan kepemimpinan agar konsultasi tidak berubah menjadi veto tanpa akhir.

Pengukuran hasil harus bergeser dari input menuju outcome. Besarnya anggaran, jumlah pelatihan, jumlah izin yang diterbitkan, atau panjang infrastruktur hanya mempunyai arti jika meningkatkan produktivitas, pendapatan, akses, dan kualitas hidup. Pemerintah perlu membangun budaya evaluasi yang menerima kemungkinan bahwa program dapat gagal atau perlu diubah. Kegagalan yang terdeteksi melalui evaluasi bukan tanda kelemahan; yang lebih berbahaya adalah mempertahankan program yang tidak efektif karena alasan politik atau reputasi.

Pada akhirnya, tema ini kembali pada tiga kata kunci artikel: pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan. Pertumbuhan menyediakan sumber daya, stabilitas menciptakan ruang untuk keputusan jangka panjang, dan kesejahteraan memberi tujuan normatif. Ketiganya harus diikat oleh institusi yang kredibel dan kemampuan belajar. Indonesia 2026 memiliki modal penting berupa skala pasar, demografi, sumber daya, posisi geopolitik, dan pengalaman menghadapi krisis. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi produktivitas yang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih luas melalui pilihan kebijakan yang konsisten melampaui siklus politik.

11. Kontrak Sosial untuk Indonesia Berpendapatan Tinggi

Perjalanan menuju negara berpendapatan tinggi memerlukan kontrak sosial yang lebih matang antara warga, dunia usaha, dan negara. Dalam praktik pembangunan, hubungan ini sering tidak langsung. Perubahan pada pajak dapat memperbaiki indikator ekonomi, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sangat bergantung pada jaminan sosial dan layanan universal. Karena itu, analisis harus bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan' menuju 'bagaimana pertumbuhan dihasilkan, siapa yang berpartisipasi, dan apa yang diwariskan kepada periode berikutnya'. Perspektif semacam ini penting bagi Indonesia karena ukuran ekonomi yang besar membuat kebijakan nasional selalu bertemu dengan variasi daerah, struktur sosial, dan kapasitas institusi yang sangat beragam.

Salah satu persoalan utama adalah adanya jarak antara indikator agregat dan pengalaman mikro. Pada tingkat nasional, jaminan sosial dapat tampak membaik, tetapi rumah tangga tertentu mungkin tetap menghadapi biaya tinggi, ketidakpastian pekerjaan, atau kualitas layanan yang rendah. Ekonomi politik memeriksa jarak tersebut melalui distribusi pendapatan, kepemilikan aset, akses terhadap jaringan, dan posisi tawar. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya diarahkan untuk memperbesar kue ekonomi,

tetapi juga untuk memperbaiki aturan pembagian kesempatan sehingga lebih banyak orang mampu ikut menghasilkan nilai tambah.

Dimensi institusional menjadi penting karena layanan universal tidak berkembang di ruang hampa. Aturan formal, praktik birokrasi, kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, dan mekanisme pengawasan membentuk perilaku aktor. Ketika pelaku usaha percaya bahwa aturan konsisten dan sengketa dapat diselesaikan secara adil, horizon investasi menjadi lebih panjang. Ketika warga percaya bahwa program publik dikelola transparan, kepatuhan meningkat. Sebaliknya, ketidakpastian regulasi dan persepsi ketidakadilan mendorong perilaku defensif: investasi ditunda, tabungan dipindahkan, atau energi dialihkan untuk mencari akses khusus.

Persoalan kepastian hukum juga menunjukkan adanya trade-off waktu. Kebijakan jangka pendek sering dibutuhkan untuk menahan guncangan, tetapi perlindungan yang terlalu lama dapat mengunci struktur lama. Subsidi, proteksi, atau insentif investasi perlu memiliki tujuan, indikator keberhasilan, dan mekanisme penghentian yang jelas. Jika tidak, kebijakan dapat berubah menjadi hak istimewa yang sulit dicabut. Ekonomi politik membantu menjelaskan mengapa kebijakan semacam itu bertahan: penerima manfaat biasanya terorganisasi, sedangkan biaya tersebar kepada banyak pembayar pajak dan konsumen.

Dari sisi pembangunan manusia, tanggung jawab warga harus ditempatkan sebagai tujuan sekaligus sarana. Individu yang sehat, terdidik, aman, dan memiliki keterampilan dapat berpartisipasi lebih produktif dalam ekonomi. Namun investasi manusia tidak cukup jika struktur ekonomi tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai. Karena itu, pendidikan, industri, pasar kerja, dan kebijakan inovasi perlu dirancang sebagai satu ekosistem. Ketidaksesuaian di antara keempatnya menghasilkan lulusan tanpa pekerjaan yang tepat, perusahaan yang kekurangan keterampilan, dan produktivitas yang stagnan.

Indonesia juga perlu membedakan antara pemerataan hasil dan pemerataan kesempatan. Pemerataan hasil tertentu diperlukan untuk menjaga standar hidup minimum, tetapi pembangunan jangka panjang menuntut perluasan kesempatan melalui pendidikan bermutu, akses kesehatan, konektivitas, pembiayaan, dan kepastian hukum. Kesempatan yang lebih merata memperbesar basis talenta nasional dan mengurangi ketergantungan pada jaringan sosial tertentu. Dalam ekonomi modern, kemampuan menemukan dan memanfaatkan talenta dari seluruh lapisan masyarakat merupakan sumber keunggulan yang sama pentingnya dengan modal fisik.

Pada tingkat kebijakan, koordinasi menjadi faktor penentu. Program yang berkaitan dengan pajak, jaminan sosial, layanan universal, kepastian hukum, dan tanggung jawab warga hampir selalu melintasi batas kementerian dan pemerintahan daerah. Tanpa arsitektur koordinasi, setiap lembaga dapat mencapai target sektoral tetapi hasil keseluruhan tetap lemah. Pendekatan whole-of-government memerlukan data bersama, definisi indikator yang konsisten, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme eskalasi masalah. Koordinasi bukan berarti sentralisasi semua keputusan; banyak keputusan justru lebih efektif ketika kewenangan didelegasikan kepada unit yang paling dekat dengan informasi.

Dalam perspektif ekonomi politik, reformasi berkelanjutan membutuhkan koalisi sosial. Kebijakan yang hanya dimiliki oleh satu kementerian atau satu periode pemerintahan rentan berubah. Sebaliknya,

ketika dunia usaha, pekerja, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan warga memahami tujuan reformasi, biaya politik untuk membatalkan kebijakan yang baik menjadi lebih tinggi. Konsultasi publik karena itu bukan sekadar prosedur, tetapi instrumen membangun informasi dan legitimasi. Proses tersebut tetap membutuhkan kepemimpinan agar konsultasi tidak berubah menjadi veto tanpa akhir.

Pengukuran hasil harus bergeser dari input menuju outcome. Besarnya anggaran, jumlah pelatihan, jumlah izin yang diterbitkan, atau panjang infrastruktur hanya mempunyai arti jika meningkatkan produktivitas, pendapatan, akses, dan kualitas hidup. Pemerintah perlu membangun budaya evaluasi yang menerima kemungkinan bahwa program dapat gagal atau perlu diubah. Kegagalan yang terdeteksi melalui evaluasi bukan tanda kelemahan; yang lebih berbahaya adalah mempertahankan program yang tidak efektif karena alasan politik atau reputasi.

Pada akhirnya, tema ini kembali pada tiga kata kunci artikel: pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan. Pertumbuhan menyediakan sumber daya, stabilitas menciptakan ruang untuk keputusan jangka panjang, dan kesejahteraan memberi tujuan normatif. Ketiganya harus diikat oleh institusi yang kredibel dan kemampuan belajar. Indonesia 2026 memiliki modal penting berupa skala pasar, demografi, sumber daya, posisi geopolitik, dan pengalaman menghadapi krisis. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi produktivitas yang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih luas melalui pilihan kebijakan yang konsisten melampaui siklus politik.

12. Dari Resiliensi menuju Transformasi

Resiliensi adalah kemampuan bertahan dari guncangan; transformasi adalah kemampuan mengubah struktur agar lebih produktif setelah guncangan. Dalam praktik pembangunan, hubungan ini sering tidak langsung. Perubahan pada adaptasi dapat memperbaiki indikator ekonomi, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sangat bergantung pada investasi dan inovasi. Karena itu, analisis harus bergerak dari pertanyaan 'berapa besar pertumbuhan' menuju 'bagaimana pertumbuhan dihasilkan, siapa yang berpartisipasi, dan apa yang diwariskan kepada periode berikutnya'. Perspektif semacam ini penting bagi Indonesia karena ukuran ekonomi yang besar membuat kebijakan nasional selalu bertemu dengan variasi daerah, struktur sosial, dan kapasitas institusi yang sangat beragam.

Salah satu persoalan utama adalah adanya jarak antara indikator agregat dan pengalaman mikro. Pada tingkat nasional, investasi dapat tampak membaik, tetapi rumah tangga tertentu mungkin tetap menghadapi biaya tinggi, ketidakpastian pekerjaan, atau kualitas layanan yang rendah. Ekonomi politik memeriksa jarak tersebut melalui distribusi pendapatan, kepemilikan aset, akses terhadap jaringan, dan posisi tawar. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya diarahkan untuk memperbesar kue ekonomi, tetapi juga untuk memperbaiki aturan pembagian kesempatan sehingga lebih banyak orang mampu ikut menghasilkan nilai tambah.

Dimensi institusional menjadi penting karena inovasi tidak berkembang di ruang hampa. Aturan formal, praktik birokrasi, kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, dan mekanisme pengawasan membentuk perilaku aktor. Ketika pelaku usaha percaya bahwa aturan konsisten dan sengketa dapat diselesaikan secara adil, horizon investasi menjadi lebih panjang. Ketika warga percaya bahwa program publik dikelola transparan, kepatuhan meningkat. Sebaliknya, ketidakpastian regulasi dan persepsi

ketidakadilan mendorong perilaku defensif: investasi ditunda, tabungan dipindahkan, atau energi dialihkan untuk mencari akses khusus.

Persoalan institusi juga menunjukkan adanya trade-off waktu. Kebijakan jangka pendek sering dibutuhkan untuk menahan guncangan, tetapi perlindungan yang terlalu lama dapat mengunci struktur lama. Subsidi, proteksi, atau insentif investasi perlu memiliki tujuan, indikator keberhasilan, dan mekanisme penghentian yang jelas. Jika tidak, kebijakan dapat berubah menjadi hak istimewa yang sulit dicabut. Ekonomi politik membantu menjelaskan mengapa kebijakan semacam itu bertahan: penerima manfaat biasanya terorganisasi, sedangkan biaya tersebar kepada banyak pembayar pajak dan konsumen.

Dari sisi pembangunan manusia, visi jangka panjang harus ditempatkan sebagai tujuan sekaligus sarana. Individu yang sehat, terdidik, aman, dan memiliki keterampilan dapat berpartisipasi lebih produktif dalam ekonomi. Namun investasi manusia tidak cukup jika struktur ekonomi tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai. Karena itu, pendidikan, industri, pasar kerja, dan kebijakan inovasi perlu dirancang sebagai satu ekosistem. Ketidaksiuaian di antara keempatnya menghasilkan lulusan tanpa pekerjaan yang tepat, perusahaan yang kekurangan keterampilan, dan produktivitas yang stagnan.

Indonesia juga perlu membedakan antara pemerataan hasil dan pemerataan kesempatan. Pemerataan hasil tertentu diperlukan untuk menjaga standar hidup minimum, tetapi pembangunan jangka panjang menuntut perluasan kesempatan melalui pendidikan bermutu, akses kesehatan, konektivitas, pembiayaan, dan kepastian hukum. Kesempatan yang lebih merata memperbesar basis talenta nasional dan mengurangi ketergantungan pada jaringan sosial tertentu. Dalam ekonomi modern, kemampuan menemukan dan memanfaatkan talenta dari seluruh lapisan masyarakat merupakan sumber keunggulan yang sama pentingnya dengan modal fisik.

Pada tingkat kebijakan, koordinasi menjadi faktor penentu. Program yang berkaitan dengan adaptasi, investasi, inovasi, institusi, dan visi jangka panjang hampir selalu melintasi batas kementerian dan pemerintahan daerah. Tanpa arsitektur koordinasi, setiap lembaga dapat mencapai target sektoral tetapi hasil keseluruhan tetap lemah. Pendekatan whole-of-government memerlukan data bersama, definisi indikator yang konsisten, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme eskalasi masalah. Koordinasi bukan berarti sentralisasi semua keputusan; banyak keputusan justru lebih efektif ketika kewenangan didelegasikan kepada unit yang paling dekat dengan informasi.

Dalam perspektif ekonomi politik, reformasi berkelanjutan membutuhkan koalisi sosial. Kebijakan yang hanya dimiliki oleh satu kementerian atau satu periode pemerintahan rentan berubah. Sebaliknya, ketika dunia usaha, pekerja, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan warga memahami tujuan reformasi, biaya politik untuk membatalkan kebijakan yang baik menjadi lebih tinggi. Konsultasi publik karena itu bukan sekadar prosedur, tetapi instrumen membangun informasi dan legitimasi. Proses tersebut tetap membutuhkan kepemimpinan agar konsultasi tidak berubah menjadi veto tanpa akhir.

Pengukuran hasil harus bergeser dari input menuju outcome. Besarnya anggaran, jumlah pelatihan, jumlah izin yang diterbitkan, atau panjang infrastruktur hanya mempunyai arti jika meningkatkan produktivitas, pendapatan, akses, dan kualitas hidup. Pemerintah perlu membangun budaya evaluasi

yang menerima kemungkinan bahwa program dapat gagal atau perlu diubah. Kegagalan yang terdeteksi melalui evaluasi bukan tanda kelemahan; yang lebih berbahaya adalah mempertahankan program yang tidak efektif karena alasan politik atau reputasi.

Pada akhirnya, tema ini kembali pada tiga kata kunci artikel: pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan. Pertumbuhan menyediakan sumber daya, stabilitas menciptakan ruang untuk keputusan jangka panjang, dan kesejahteraan memberi tujuan normatif. Ketiganya harus diikat oleh institusi yang kredibel dan kemampuan belajar. Indonesia 2026 memiliki modal penting berupa skala pasar, demografi, sumber daya, posisi geopolitik, dan pengalaman menghadapi krisis. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi produktivitas yang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih luas melalui pilihan kebijakan yang konsisten melampaui siklus politik.